

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Inspektur Pembantu I
Dari : Inspektur Kabupaten Gresik
Tanggal : 2 Desember 2025
Nomor : 005/2942/437.72/2025
Perihal : Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP inspektorat Tahun 2025.

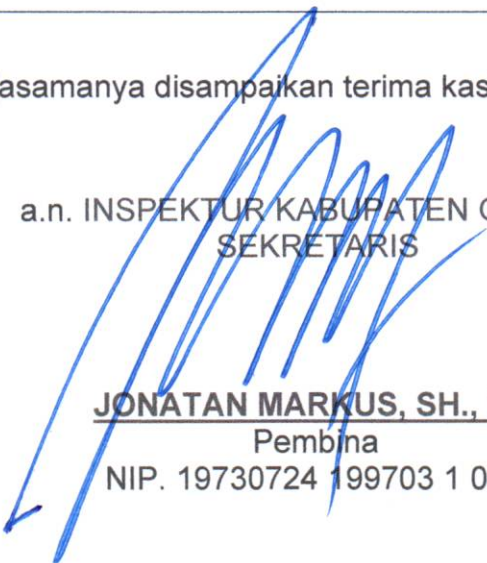
Menindaklanjuti Laporan hasil evaluasi implementasi SAKIP pada Inspektorat Kabupaten Gresik Nomor : 700/2306.10/437.72/2025 tanggal 14 Oktober 2025, bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh inspektorat, terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan diantaranya :

NO	Rekomendasi LHE	Tindak Lanjut
1	Agar dokumen Renstra semakin kuat secara legal, draft indikator kinerja (IKI dan IKU) perlu di finalisasi dan di sahkan / diformalkan.	Sudah dilakukan pembuatan dan pengesahan SK IKU dan IKI Inspektorat 2025 terbaru berdasarkan Renstra Inspektorat 2025-2029 terbaru, sebagaimana dokumen terlampir.
2	Agar capaian kinerja pada seluruh indikator dapat terpenuhi secara optimal, disarankan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap indikator yang belum mencapai target, memperbaiki metode pengukuran dan analisis data kinerja.	a. Evaluasi terhadap kinerja pengawasan, pendampingan dan kesekretariatan telah dilakukan secara berkala dan insidentil sesuai kebutuhan dan rencana yang telah di programkan diantaranya: - Evaluasi realisasi kegiatan setiap bulan dari kegiatan maupun anggaran. - Evaluasi tematik secara periodik terhadap progres capaian IKU Inspektorat, seperti pemenuhan PK APIP, Monev SAKIP, TL BPK, MCP KPK, SPIP dan Program mandatory lainnya b. Metode pengukuran dan analisis kinerja juga sudah dilakukan dengan mempertimbangkan dan sinkronisasi dengan: - Capaian kinerja tahun sebelumnya. - Kebutuhan/Target capaian kinerja dari Pemda, Propinsi, dan Nasional. - Kemampuan dan/atau ketersediaan sumberdaya internal. - Faktor eksternal yang berpengaruh. sehingga dalam IKU (Renstra) yang berlaku tahun 2025-2029 telah disesuaikan dan sinkronisasi dengan aspek lain yang berpengaruh.
3	Agar pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan, disarankan untuk	Perbaiki dan penyempurnaan laporan / data dukung / dokumentasi kegiatan / program terus dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai bentuk fasilitasi / jenis dokumentasi seperti :

memperkuat dokumentasi bukti dukung, serta laporan evaluasi lanjutan secara berkala	• Dokumentasi manual / konvensional (Surat, foto, arsip, dll). • Dokumentasi digital (Media aplikasi, Medsos dan website)
---	---

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK
SEKRETARIS


JONATAN MARKUS, SH., MH.
Pembina
NIP. 19730724 199703 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
G R E S I K

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 700/89/437.72/Kep/2025

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR NOMOR
700/15/437.72/Kep/2025 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Diktum Ketiga Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/532/HK/437.12/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Di lingkungan Inspektorat Kabupaten Gresik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Gresik tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Inspektorat Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Di lingkungan Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertujuan untuk:
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan

- dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Inspektorat Kabupaten Gresik dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis;
- b. Perencanaan Tahunan;
- c. Penetapan Kinerja;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
- e. Evaluasi Kinerja Intansi Pemerintah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gresik

Pada Tanggal : 10 Nopember 2025


**INSPEKTUR
KABUPATEN GRESIK**
Dr. ACHMAD HADI, SP., MT., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 700/89/437.72/Kep/2025 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS

KEPUTUSAN INSPEKTUR NOMOR 700/15/437.72/Kep/2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Tugas : Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah
I.K.S.1.1	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal
	Definisi
	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal adalah jumlah rekomendasi atas pemeriksaan keuangan dan kinerja yang ditindaklanjuti yang berstatus telah selesai dibagi jumlah seluruh rekomendasi dikali 100% (seratus persen).

	Tujuan dari Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal adalah untuk memantau tindak lanjut perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten Gresik terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh internal maupun eksternal sesuai dengan pasal 20 UU no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,05 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit” Pengukuran Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal secara periodik setiap satu tahun sekali dan Eksternal dilakukan secara periodik setiap semester sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Laporan hasil pemantauan Tindak Lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan hasil pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
S.2	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah
I.K.S.2.1	Rata-rata kategori hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah
	Definisi
	Rata-rata kategori hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah adalah Nilai rata-rata dari total jumlah nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah dibagi jumlah Organisasi Perangkat Daerah.

Tujuan dari Rata-rata kategori hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah adalah untuk menilai dan memperbaiki kinerja perangkat daerah dalam mengelola anggaran dan program berbasis hasil (<i>result-based management</i>) Rata-rata kategori hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah dikeluarkan oleh inspektorat dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. dengan 7 (tujuh) kategori penilaian mulai dari yang paling rendah yaitu: - kategori "D" (sangat kurang) dengan nilai 0 - 30; - kategori "C" (kurang) dengan nilai di atas 30 - 50; - kategori "CC" (cukup) dengan nilai di atas 50 - 60; - kategori "B" (Baik) dengan nilai di atas 60 - 70; - kategori "BB" (Sangat Baik) dengan nilai di atas 70 - 80; - kategori "A" (Memuaskan) dengan nilai di atas 80 - 90; dan - kategori "AA" (Sangat Memuaskan) dengan nilai di atas 90 - 100. Rata-rata kategori hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,20 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit" Rata-rata kategori hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
Sumber Data
Laporan rata-rata kategori hasil evaluasi Sistem

	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik
S.3	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas (PM) Sistem Pengendali Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi
I.K.S.3.1	Nilai maturitas Sistem Pengendalian <i>Intern</i> Pemerintah (SPIP).
	Definisi Nilai maturitas Sistem Pengendalian <i>Intern</i> Pemerintah (SPIP) Terintegrasi adalah nilai yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada laporan hasil pelaksanaan evaluasinya atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Gresik Tujuan dari Nilai maturitas Sistem Pengendali <i>Intern</i> Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Kabupaten Gresik adalah untuk menjamin bahwa pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi telah mengacu pada peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada K/L/D dan memutuskan nilai maturitas penyelenggaran SPIP, MRI dan IEPK. Nilai maturitas Sistem Pengendali <i>Intern</i> Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dihitung dalam rentang 0-5 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,05 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit” Pengukuran Nilai maturitas Sistem Pengendali <i>Intern</i> Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan

	Sumber Data
	Berdasarkan hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
I.K.S.3.2	Nilai Kapabilitas APIP
	Definisi
	Nilai Kapabilitas APIP adalah nilai yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada laporan hasil pelaksanaan evaluasinya atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Gresik Tujuan dari Nilai Kapabilitas APIP adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa penilaian mandiri kapabilitas APIP Level 3 pada inspektorat telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja inspektorat dan telah mengacu pada peraturan BPKP Nomor 8 tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Nilai Kapabilitas APIP dihitung dalam rentang 0-5 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,01 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan indikator sasaran “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)” Pengukuran Nilai Kapabilitas APIP dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Berdasarkan hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : SEKRETARIS

Tugas : Melaksanakan pembinaan teknis administratif ke dalam semua unsur di lingkungan inspektorat meliputi pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan

Fungsi : a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama, c. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, d, pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja, e. pelaksanaan pengelolaan keuangan, f. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan bidang tugasnya

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam setahun	(jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang dihasilkan / jumlah kebutuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja) X 100%	Dokumen (Laporan)
2	Terlaksananya Pengelolaan Adminsitasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Adminsitasi Keuangan Perangkat Daerah dalam setahun	(jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan serta pelaporan dan analisa keuangan maupun anggarannya yang dihasilkan / jumlah kebutuhan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta pelaporan dan analisa keuangan maupun anggarannya) X 100%	Laporan Pembayaran gaji dan tunjangan dan dokumen keuangan
3	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam setahun	(jumlah bahan dan kegiatan administrasi umum yang terpenuhi / jumlah kebutuhan bahan dan kegiatan administrasi umum) X 100%	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
4	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dalam setahun	(jumlah fasilitasi kegiatan dan SDM dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dihasilkan / jumlah kebutuhan fasilitasi kegiatan dan SDM dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur) X 100%	Laporan Kegiatan, Sertifikat
5	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam	(jumlah fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	Laporan Kegiatan Fasilitasi

		setahun	terpenuhi / jumlah Kebutuhan fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) x 100%	
6	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam setahun	(jumlah fasilitas Pemeliharaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi / jumlah kebutuhan fasilitas Pemeliharaan Pengadaan Barang Milik Daerah) x 100%	Laporan Kegiatan Fasilitas
7	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dalam setahun	(jumlah Laporan Pengawasan, reviu serta monev internal dan eksternal dalam hal keuangan dan kinerja yang dihasilkan / jumlah kebutuhan Laporan Pengawasan, reviu serta monev internal dan eksternal dalam hal keuangan dan kinerja) x 100%	Dokumen (LHP)
8	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dalam setahun	(jumlah Laporan Pengawasan tujuan tertentu, pengaduan masyarakat (kasus) serta penanganan kerugian daerah yang dihasilkan dan ditindaklanjuti / jumlah Laporan Pengawasan tujuan tertentu, pengaduan masyarakat (kasus) serta penanganan kerugian daerah yang masuk) x 100%	Dokumen (LHP)
9	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan kegiatan Pendampingan dan Asistensi dalam setahun	(Jumlah Laporan Kegiatan pendampingan dan asistensi yang terlaksana / Jumlah Kebutuhan Laporan Kegiatan pendampingan dan asistensi) x 100%	Laporan Kegiatan
10	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	(Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang terlaksana / Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan) x 100%	Laporan Perumusan
11	Terlaksananya Perintah/penugasan Pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja Organisasi	Persentase penyelesaian perintah/penugasan pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan	Persentase penyelesaian perintah/penugasan pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan dalam setahun	Laporan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : KEPALA INSPEKTUR PEMBANTU 1

Tugas : Membantu inspektur dalam mengkoordinasikan jabatan fungsional auditor dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana desa.

Fungsi : a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah; b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah; f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu; j. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 Kali)	(Tercukupinya dokumen atas pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dibagi jumlah Elemen Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP) x 100%	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Persentase terlaksananya Audit (2 LHP)	(Jumlah atas pelaksanaan Audit dibagi Jumlah target pelaksanaan Audit) x 100%	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	Persentase terlaksananya Reviu (15 LHR)	(Jumlah atas pelaksanaan Reviu dibagi Jumlah target pelaksanaan Reviu) x 100%	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Persentase terlaksananya Monev (4 LHE)	(Jumlah atas pelaksanaan Monev dibagi Jumlah target pelaksanaan Monev) x 100%	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Persentase terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (2 sertifikat)	(Jumlah atas pelaksanaan Diklat/Pelatihan dibagi Jumlah target pelaksanaan Diklat/Pelatihan) x 100%	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Persentase Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (4 Rekomendasi)	(Jumlah tindak lanjut sesuai rekomendasi dibagi Jumlah Rekomendasi Audit internal) x 100%	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (11 SKPD)	Total nilai SAKIP SKPD IRBAN I dibagi jumlah SKPD IRBAN I	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Presentase terlaksananya Penilaian Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 3 (1 kali)	(Jumlah Perangkat Daerah IRBAN I yang dilakukan Penilaian Mandiri	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

			SPIP dibagi Jumlah seluruh Perangkat Daerah IRBAN I) X 100%	
9	Terlaksananya tugas-tugas yang diberikan atasan	Presentase Terlaksananya tugas-tugas lain yang diberikan atasan (2 kali)	Jumlah penugasan kedinasan lain yang dilaksanakan dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi IRBAN I dibagi Seluruh Penugasan kedinasan lain yang dilaksanakan) x 100%	Surat Perintah, Nota Dinas, Laporan Hasil Konsultasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : KEPALA INSPEKTUR PEMBANTU 2

Tugas : Membantu inspektur dalam mengkoordinasikan jabatan fungsional auditor dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana desa.

Fungsi : a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah; b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah; f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu; j. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	Jumlah terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Terlaksananya Audit (2 Laporan)	Jumlah terlaksananya Audit	Surat Perintah, LHA
3	Terlaksananya Reviu	Terlaksananya Reviu (10 Laporan)	Jumlah terlaksananya Reviu	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Terlaksananya Monev (4 Laporan)	Jumlah terlaksananya Monev	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (1 kali)	Jumlah terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (1 Laporan)	Jumlah terlaksananya tindak lanjut sesuai rekomendasi	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (3 OPD)	Total nilai SAKIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Nilai rata-rata Maturitas SPIP SKPD Level 3 (3 OPD)	Total Nilai Maturitas SPIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : Plt. KEPALA INSPEKTUR PEMBANTU 3

Tugas : Membantu inspektur dalam mengkoordinasikan jabatan fungsional auditor dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana desa

Fungsi : a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah; b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah; f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu; j. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	(Pemenuhan dokumen/data pendukung Penilaian Mandiri pada Elemen PK APIP dibagi Jumlah Total Elemen PK APIP) x 100 %	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Persentase terlaksananya Audit (3 LHP)	(Jumlah atas pelaksanaan Audit dibagi Jumlah target pelaksanaan Audit) x 100%	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	Persentase terlaksananya Reviu (15 LHR)	(Jumlah atas pelaksanaan Reviu dibagi Jumlah target pelaksanaan Reviu) x 100%	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Persentase terlaksananya Monev (6 LHE)	(Jumlah atas pelaksanaan Monev dibagi Jumlah target pelaksanaan Monev) x 100%	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Persentase terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (1 kali)	(Jumlah atas pelaksanaan Diklat/Pelatihan dibagi Jumlah target pelaksanaan Diklat/Pelatihan/PKS) x 100%	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut hasil pengawasan Internal Sesuai Rekomendasi	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan Internal Sesuai Rekomendasi (3 Rekomendasi)	(Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sesuai rekomendasi dibagi jumlah rekomendasi hasil pengawasan) x 100%	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP Pemerintah Daerah dengan nilai sebesar 87 (A)	Nilai rata-rata Hasil Evaluasi SAKIP (12 SKPD)	Total nilai SAKIP SKPD pada IRBAN III dibagi jumlah SKPD pada IRBAN III	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Level 3	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Level 3 (1 kali)	(Jumlah atas pemenuhan dokumen/data dukung penilaian	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

			mandiri maturitas SPIP dibagi jumlah dokumen/data yang dibutuhkan pada penilaian mandiri maturitas SPIP) x 100%	
--	--	--	--	--

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : KEPALA INSPEKTUR PEMBANTU 4

Tugas : Membantu inspektur dalam mengkoordinasikan jabatan fungsional auditor dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana desa.

Fungsi : a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah; b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah; f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu; j. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	Jumlah atas terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	terlaksananya Audit (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Audit	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	terlaksananya Reviu (10 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Reviu	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	terlaksananya Monev (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Monev	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop/PKS (2 kali)	Jumlah atas terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop/PKS	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya tindak lanjut Audit internal	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (2 OPD)	Total nilai SAKIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Nilai rata-rata Maturitas SPIP SKPD Level 3 (2 OPD)	Total Nilai Maturitas SPIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : KEPALA INSPEKTUR KHUSUS

Tugas : Membantu Inspektur dalam mengkoordinasikan jabatan fungsional untuk melaksanakan tugas koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah.

Fungsi : a) Penyiapan penyusunan kebijakan terkait koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi pada perangkat daerah; b) Perencanaan program pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah; c) Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; d) Pengkoordinasian pelaksanaan terhadap tindakan yang berpotensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah; e) Pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi; f) Penyusunan laporan hasil audit tujuan tertentu, audit investigasi dan pengaduan; g) Penyusunan laporan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan program reformasi birokrasi; dan h). Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Meningkatkan Kapabilitas APIP Level 3	Presentase terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	(Pemenuhan dokumen/ data pendukung Penilaian Mandiri pada Elemen PK APIP dibagi Jumlah Total Elemen PK APIP) x 100%	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Aplikasi PK APIP
2	Meningkatkan Kapabilitas APIP Level 3	Presentase terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop	(Jumlah Pelaksanaan Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop dibagi target pelaksanaan Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop) x 100%	Surat Perintah Tugas, Sertifikat
3	Meningkatnya Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Internal dan Eksternal	Presentase Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal dan Eksternal sesuai rekomendasi	(Jumlah Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal (Audit, Reviu, Monev) dan Pemeriksaan Eksternal sesuai rekomendasi dibagi total jumlah rekomendasi Pemeriksaan Internal (Audit, Reviu, Monev) dan Eksternal) x 100%	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
4	Meningkatnya Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Internal dan Eksternal	Presentase Tindak Lanjut Aduan Masyarakat yang ditangani	(Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk) x 100%	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
5	Meningkatnya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Level 3	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi	(Jumlah OPD yang telah dievaluasi SPIP dibagi Jumlah OPD) x 100%	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan, Aplikasi SPIP terintegrasi
6	Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya	Presentase pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya	(Jumlah pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur dibagi target pelaksanaan	Surat Perintah Tugas, Surat Disposisi, Laporan Kegiatan

		tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur) x 100%	
--	--	---	--

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI MADYA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	Jumlah atas terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	terlaksananya Audit (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Audit	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	terlaksananya Reviu (10 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Reviu	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	terlaksananya Monev (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Monev	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop/PKS (2 kali)	Jumlah atas terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop/PKS	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya tindak lanjut Audit internal	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (2 OPD)	Total nilai SAKIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Nilai rata-rata Maturitas SPIP SKPD Level 3 (2 OPD)	Total Nilai Maturitas SPIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI MADYA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	Jumlah terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Terlaksananya Audit (2 Laporan)	Jumlah terlaksananya Audit	Surat Perintah, LHA
3	Terlaksananya Reviu	Terlaksananya Reviu (10 Laporan)	Jumlah terlaksananya Reviu	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Terlaksananya Monev (4 Laporan)	Jumlah terlaksananya Monev	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (1 kali)	Jumlah terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (1 Laporan)	Jumlah terlaksananya tindak lanjut sesuai rekomendasi	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (3 OPD)	Total nilai SAKIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Nilai rata-rata Maturitas SPIP SKPD Level 3 (3 OPD)	Total Nilai Maturitas SPIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI MADYA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
2	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
3	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
4	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
5	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
6	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
7	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Sertifikat, Laporan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI MADYA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	(Pemenuhan dokumen/data pendukung Penilaian Mandiri pada Elemen PK APIP dibagi Jumlah Total Elemen PK APIP) x 100 %	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Persentase terlaksananya Audit (3 LHP)	(Jumlah atas pelaksanaan Audit dibagi Jumlah target pelaksanaan Audit) x 100%	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	Persentase terlaksananya Reviu (15 LHR)	(Jumlah atas pelaksanaan Reviu dibagi Jumlah target pelaksanaan Reviu) x 100%	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Persentase terlaksananya Monev (6 LHE)	(Jumlah atas pelaksanaan Monev dibagi Jumlah target pelaksanaan Monev) x 100%	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Persentase terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (1 kali)	(Jumlah atas pelaksanaan Diklat/Pelatihan dibagi Jumlah target pelaksanaan Diklat/Pelatihan/PKS) x 100%	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut hasil pengawasan Internal Sesuai Rekomendasi	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan Internal Sesuai Rekomendasi (3 Rekomendasi)	(Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sesuai rekomendasi dibagi jumlah rekomendasi hasil pengawasan) x 100%	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP Pemerintah Daerah dengan nilai sebesar 87 (A)	Nilai rata-rata Hasil Evaluasi SAKIP (12 SKPD)	Total nilai SAKIP SKPD pada IRBAN III dibagi jumlah SKPD pada IRBAN III	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Level 3	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Level 3 (1 kali)	(Jumlah atas pemenuhan dokumen/data dukung penilaian mandiri maturitas SPIP dibagi jumlah dokumen/data yang dibutuhkan pada penilaian mandiri maturitas SPIP) x 100%	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI MADYA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 Kali)	(Tercukupinya dokumen atas pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dibagi jumlah Elemen Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP) x 100%	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Persentase terlaksananya Audit (2 LHP)	(Jumlah atas pelaksanaan Audit dibagi Jumlah target pelaksanaan Audit) x 100%	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	Persentase terlaksananya Reviu (15 LHR)	(Jumlah atas pelaksanaan Reviu dibagi Jumlah target pelaksanaan Reviu) x 100%	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Persentase terlaksananya Monev (4 LHE)	(Jumlah atas pelaksanaan Monev dibagi Jumlah target pelaksanaan Monev) x 100%	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Persentase terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (2 sertifikat)	(Jumlah atas pelaksanaan Diklat/Pelatihan dibagi Jumlah target pelaksanaan Diklat/Pelatihan) x 100%	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Persentase Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (4 Rekomendasi)	(Jumlah tindak lanjut sesuai rekomendasi dibagi Jumlah Rekomendasi Audit internal) x 100%	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (11 SKPD)	Total nilai SAKIP SKPD IRBAN I dibagi jumlah SKPD IRBAN I	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Presentase terlaksananya Penilaian Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 3 (1 kali)	(Jumlah Perangkat Daerah IRBAN I yang dilakukan Penilaian Mandiri SPIP dibagi Jumlah seluruh Perangkat Daerah IRBAN I) X 100%	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi
9	Terlaksananya tugas-tugas yang diberikan atasan	Presentase Terlaksananya tugas-tugas lain yang diberikan atasan (2 kali)	Jumlah penugasan kedinasan lain yang dilaksanakan dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi	Surat Perintah, Nota Dinas, Laporan Hasil Konsultasi

		IRBAN I dibagi Seluruh Penugasan kedinasan lain yang dilaksanakan) x 100%	
--	--	---	--

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI MADYA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	Jumlah terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Terlaksananya Audit (2 Laporan)	Jumlah terlaksananya Audit	Surat Perintah, LHA
3	Terlaksananya Reviu	Terlaksananya Reviu (10 Laporan)	Jumlah terlaksananya Reviu	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Terlaksananya Monev (4 Laporan)	Jumlah terlaksananya Monev	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (1 kali)	Jumlah terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (1 Laporan)	Jumlah terlaksananya tindak lanjut sesuai rekomendasi	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (3 OPD)	Total nilai SAKIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Nilai rata-rata Maturitas SPIP SKPD Level 3 (3 OPD)	Total Nilai Maturitas SPIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI MADYA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
2	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
3	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
4	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
5	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
6	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
7	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Sertifikat, Laporan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI MADYA

Tugas : Melakukan Kegiatan Pengawasan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren meliputi Reviu, Monev, Evaluasi dan Pemeriksaan

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
2	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
3	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
4	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
5	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
6	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Pengawalan OPD Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Pengawalan OPD Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi
7	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Laporan
8	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Laporan
9	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Sertifikat, Laporan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI MUDA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 Kali)	(Tercukupinya dokumen atas pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dibagi jumlah Elemen Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP) x 100%	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Persentase terlaksananya Audit (2 LHP)	(Jumlah atas pelaksanaan Audit dibagi Jumlah target pelaksanaan Audit) x 100%	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	Persentase terlaksananya Reviu (15 LHR)	(Jumlah atas pelaksanaan Reviu dibagi Jumlah target pelaksanaan Reviu) x 100%	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Persentase terlaksananya Monev (4 LHE)	(Jumlah atas pelaksanaan Monev dibagi Jumlah target pelaksanaan Monev) x 100%	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Persentase terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (2 sertifikat)	(Jumlah atas pelaksanaan Diklat/Pelatihan dibagi Jumlah target pelaksanaan Diklat/Pelatihan) x 100%	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Persentase Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (4 Rekomendasi)	(Jumlah tindak lanjut sesuai rekomendasi dibagi Jumlah Rekomendasi Audit internal) x 100%	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (11 SKPD)	Total nilai SAKIP SKPD IRBAN I dibagi jumlah SKPD IRBAN I	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Presentase terlaksananya Penilaian Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 3 (1 kali)	(Jumlah Perangkat Daerah IRBAN I yang dilakukan Penilaian Mandiri SPIP dibagi Jumlah seluruh Perangkat Daerah IRBAN I) X 100%	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi
9	Terlaksananya tugas-tugas yang diberikan atasan	Presentase Terlaksananya tugas-tugas lain yang diberikan atasan (2 kali)	Jumlah penugasan kedinasan lain yang dilaksanakan dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi	Surat Perintah, Nota Dinas, Laporan Hasil Konsultasi

		IRBAN I dibagi Seluruh Penugasan kedinasan lain yang dilaksanakan) x 100%	
--	--	---	--

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI MUDA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	(Pemenuhan dokumen/data pendukung Penilaian Mandiri pada Elemen PK APIP dibagi Jumlah Total Elemen PK APIP) x 100 %	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Persentase terlaksananya Audit (3 LHP)	(Jumlah atas pelaksanaan Audit dibagi Jumlah target pelaksanaan Audit) x 100%	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	Persentase terlaksananya Reviu (15 LHR)	(Jumlah atas pelaksanaan Reviu dibagi Jumlah target pelaksanaan Reviu) x 100%	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Persentase terlaksananya Monev (6 LHE)	(Jumlah atas pelaksanaan Monev dibagi Jumlah target pelaksanaan Monev) x 100%	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Persentase terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (1 kali)	(Jumlah atas pelaksanaan Diklat/Pelatihan dibagi Jumlah target pelaksanaan Diklat/Pelatihan/PKS) x 100%	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut hasil pengawasan Internal Sesuai Rekomendasi	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan Internal Sesuai Rekomendasi (3 Rekomendasi)	(Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sesuai rekomendasi dibagi jumlah rekomendasi hasil pengawasan) x 100%	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP Pemerintah Daerah dengan nilai sebesar 87 (A)	Nilai rata-rata Hasil Evaluasi SAKIP (12 SKPD)	Total nilai SAKIP SKPD pada IRBAN III dibagi jumlah SKPD pada IRBAN III	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Level 3	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Level 3 (1 kali)	(Jumlah atas pemenuhan dokumen/data dukung penilaian mandiri maturitas SPIP dibagi jumlah dokumen/data yang dibutuhkan pada penilaian mandiri maturitas SPIP) x 100%	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI MUDA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	Jumlah atas terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	terlaksananya Audit (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Audit	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	terlaksananya Reviu (10 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Reviu	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	terlaksananya Monev (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Monev	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop/PKS (2 kali)	Jumlah atas terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop/PKS	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya tindak lanjut Audit internal	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (2 OPD)	Total nilai SAKIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Nilai rata-rata Maturitas SPIP SKPD Level 3 (2 OPD)	Total Nilai Maturitas SPIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI PERTAMA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
2	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
3	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
4	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
5	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
6	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
7	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Sertifikat, Laporan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI PERTAMA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 Kali)	(Tercukupinya dokumen atas pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dibagi jumlah Elemen Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP) x 100%	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Persentase terlaksananya Audit (2 LHP)	(Jumlah atas pelaksanaan Audit dibagi Jumlah target pelaksanaan Audit) x 100%	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	Persentase terlaksananya Reviu (15 LHR)	(Jumlah atas pelaksanaan Reviu dibagi Jumlah target pelaksanaan Reviu) x 100%	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Persentase terlaksananya Monev (4 LHE)	(Jumlah atas pelaksanaan Monev dibagi Jumlah target pelaksanaan Monev) x 100%	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Persentase terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (2 sertifikat)	(Jumlah atas pelaksanaan Diklat/Pelatihan dibagi Jumlah target pelaksanaan Diklat/Pelatihan) x 100%	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Persentase Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (4 Rekomendasi)	(Jumlah tindak lanjut sesuai rekomendasi dibagi Jumlah Rekomendasi Audit internal) x 100%	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (11 SKPD)	Total nilai SAKIP SKPD IRBAN I dibagi jumlah SKPD IRBAN I	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Presentase terlaksananya Penilaian Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 3 (1 kali)	(Jumlah Perangkat Daerah IRBAN I yang dilakukan Penilaian Mandiri SPIP dibagi Jumlah seluruh Perangkat Daerah IRBAN I) X 100%	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi
9	Terlaksananya tugas-tugas yang diberikan atasan	Presentase Terlaksananya tugas-tugas lain yang diberikan atasan (2 kali)	Jumlah penugasan kedinasan lain yang dilaksanakan dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi	Surat Perintah, Nota Dinas, Laporan Hasil Konsultasi

		IRBAN I dibagi Seluruh Penugasan kedinasan lain yang dilaksanakan) x 100%	
--	--	---	--

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI PERTAMA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	(Pemenuhan dokumen/data pendukung Penilaian Mandiri pada Elemen PK APIP dibagi Jumlah Total Elemen PK APIP) x 100 %	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Persentase terlaksananya Audit (3 LHP)	(Jumlah atas pelaksanaan Audit dibagi Jumlah target pelaksanaan Audit) x 100%	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	Persentase terlaksananya Reviu (15 LHR)	(Jumlah atas pelaksanaan Reviu dibagi Jumlah target pelaksanaan Reviu) x 100%	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Persentase terlaksananya Monev (6 LHE)	(Jumlah atas pelaksanaan Monev dibagi Jumlah target pelaksanaan Monev) x 100%	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Persentase terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (1 kali)	(Jumlah atas pelaksanaan Diklat/Pelatihan dibagi Jumlah target pelaksanaan Diklat/Pelatihan/PKS) x 100%	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut hasil pengawasan Internal Sesuai Rekomendasi	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan Internal Sesuai Rekomendasi (3 Rekomendasi)	(Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sesuai rekomendasi dibagi jumlah rekomendasi hasil pengawasan) x 100%	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP Pemerintah Daerah dengan nilai sebesar 87 (A)	Nilai rata-rata Hasil Evaluasi SAKIP (12 SKPD)	Total nilai SAKIP SKPD pada IRBAN III dibagi jumlah SKPD pada IRBAN III	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Level 3	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Level 3 (1 kali)	(Jumlah atas pemenuhan dokumen/data dukung penilaian mandiri maturitas SPIP dibagi jumlah dokumen/data yang dibutuhkan pada penilaian mandiri maturitas SPIP) x 100%	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI PERTAMA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	Jumlah terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Terlaksananya Audit (2 Laporan)	Jumlah terlaksananya Audit	Surat Perintah, LHA
3	Terlaksananya Reviu	Terlaksananya Reviu (10 Laporan)	Jumlah terlaksananya Reviu	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Terlaksananya Monev (4 Laporan)	Jumlah terlaksananya Monev	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (1 kali)	Jumlah terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (1 Laporan)	Jumlah terlaksananya tindak lanjut sesuai rekomendasi	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (3 OPD)	Total nilai SAKIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Nilai rata-rata Maturitas SPIP SKPD Level 3 (3 OPD)	Total Nilai Maturitas SPIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI PERTAMA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	Jumlah terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Terlaksananya Audit (2 Laporan)	Jumlah terlaksananya Audit	Surat Perintah, LHA
3	Terlaksananya Reviu	Terlaksananya Reviu (10 Laporan)	Jumlah terlaksananya Reviu	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Terlaksananya Monev (4 Laporan)	Jumlah terlaksananya Monev	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (1 kali)	Jumlah terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (1 Laporan)	Jumlah terlaksananya tindak lanjut sesuai rekomendasi	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (3 OPD)	Total nilai SAKIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Nilai rata-rata Maturitas SPIP SKPD Level 3 (3 OPD)	Total Nilai Maturitas SPIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI PERTAMA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	Jumlah atas terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	terlaksananya Audit (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Audit	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	terlaksananya Reviu (10 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Reviu	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	terlaksananya Monev (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Monev	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop/PKS (2 kali)	Jumlah atas terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop/PKS	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya tindak lanjut Audit internal	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (2 OPD)	Total nilai SAKIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Nilai rata-rata Maturitas SPIP SKPD Level 3 (2 OPD)	Total Nilai Maturitas SPIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI PERTAMA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	(Pemenuhan dokumen/data pendukung Penilaian Mandiri pada Elemen PK APIP dibagi Jumlah Total Elemen PK APIP) x 100 %	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Persentase terlaksananya Audit (2 LHP)	(Jumlah atas pelaksanaan Audit dibagi Jumlah target pelaksanaan Audit) x 100%	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	Persentase terlaksananya Reviu (15 LHR)	(Jumlah atas pelaksanaan Reviu dibagi Jumlah target pelaksanaan Reviu) x 100%	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Persentase terlaksananya Monev (4 LHE)	(Jumlah atas pelaksanaan Monev dibagi Jumlah target pelaksanaan Monev) x 100%	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Persentase terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (1 kali)	(Jumlah atas pelaksanaan Diklat/Pelatihan dibagi Jumlah target pelaksanaan Diklat/Pelatihan/PKS) x 100%	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut hasil pengawasan Internal Sesuai Rekomendasi	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan Internal Sesuai Rekomendasi (2 Rekomendasi)	(Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sesuai rekomendasi dibagi jumlah rekomendasi hasil pengawasan) x 100%	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP Pemerintah Daerah dengan nilai sebesar 87 (A)	Nilai rata-rata Hasil Evaluasi SAKIP (12 SKPD)	Total nilai SAKIP SKPD pada IRBAN III dibagi jumlah SKPD pada IRBAN III	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Level 3	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Level 3 (1 kali)	(Jumlah atas pemenuhan dokumen/data dukung penilaian mandiri maturitas SPIP dibagi jumlah dokumen/data yang dibutuhkan pada penilaian mandiri maturitas SPIP) x 100%	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI PERTAMA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 Kali)	(Tercukupinya dokumen atas pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dibagi jumlah Elemen Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP) x 100%	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Persentase terlaksananya Audit (2 LHP)	(Jumlah atas pelaksanaan Audit dibagi Jumlah target pelaksanaan Audit) x 100%	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	Persentase terlaksananya Reviu (15 LHR)	(Jumlah atas pelaksanaan Reviu dibagi Jumlah target pelaksanaan Reviu) x 100%	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Persentase terlaksananya Monev (4 LHE)	(Jumlah atas pelaksanaan Monev dibagi Jumlah target pelaksanaan Monev) x 100%	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Persentase terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (2 sertifikat)	(Jumlah atas pelaksanaan Diklat/Pelatihan dibagi Jumlah target pelaksanaan Diklat/Pelatihan) x 100%	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Persentase Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (4 Rekomendasi)	(Jumlah tindak lanjut sesuai rekomendasi dibagi Jumlah Rekomendasi Audit internal) x 100%	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (11 SKPD)	Total nilai SAKIP SKPD IRBAN I dibagi jumlah SKPD IRBAN I	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Presentase terlaksananya Penilaian Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 3 (1 kali)	(Jumlah Perangkat Daerah IRBAN I yang dilakukan Penilaian Mandiri SPIP dibagi Jumlah seluruh Perangkat Daerah IRBAN I) X 100%	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi
9	Terlaksananya tugas-tugas yang diberikan atasan	Presentase Terlaksananya tugas-tugas lain yang diberikan atasan (2 kali)	Jumlah penugasan kedinasan lain yang dilaksanakan dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi	Surat Perintah, Nota Dinas, Laporan Hasil Konsultasi

		IRBAN I dibagi Seluruh Penugasan kedinasan lain yang dilaksanakan) x 100%	
--	--	---	--

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA

Tugas : Melakukan Kegiatan Pengawasan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren meliputi Reviu, Monev, Evaluasi dan Pemeriksaan

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
2	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
3	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
4	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
5	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
6	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Pengawalan OPD Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Pengawalan OPD Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi
7	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Laporan
8	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Laporan
9	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Sertifikat, Laporan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA

Tugas : Melakukan Kegiatan Pengawasan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren meliputi Reviu, Monev, Evaluasi dan Pemeriksaan

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
2	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
3	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
4	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
5	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
6	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Pengawalan OPD Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Pengawalan OPD Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi
7	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Laporan
8	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Laporan
9	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Sertifikat, Laporan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA

Tugas : Melakukan Kegiatan Pengawasan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren meliputi Reviu, Monev, Evaluasi dan Pemeriksaan

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
2	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
3	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
4	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
5	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
6	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Pengawalan OPD Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Pengawalan OPD Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi
7	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Laporan
8	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Laporan
9	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Sertifikat, Laporan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR TERAMPIL

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 Kali)	(Tercukupinya dokumen atas pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dibagi jumlah Elemen Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP) x 100%	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Persentase terlaksananya Audit (2 LHP)	(Jumlah atas pelaksanaan Audit dibagi Jumlah target pelaksanaan Audit) x 100%	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	Persentase terlaksananya Reviu (15 LHR)	(Jumlah atas pelaksanaan Reviu dibagi Jumlah target pelaksanaan Reviu) x 100%	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Persentase terlaksananya Monev (4 LHE)	(Jumlah atas pelaksanaan Monev dibagi Jumlah target pelaksanaan Monev) x 100%	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Persentase terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (2 sertifikat)	(Jumlah atas pelaksanaan Diklat/Pelatihan dibagi Jumlah target pelaksanaan Diklat/Pelatihan) x 100%	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Persentase Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (4 Rekomendasi)	(Jumlah tindak lanjut sesuai rekomendasi dibagi Jumlah Rekomendasi Audit internal) x 100%	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (11 SKPD)	Total nilai SAKIP SKPD IRBAN I dibagi jumlah SKPD IRBAN I	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Presentase terlaksananya Penilaian Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 3 (1 kali)	(Jumlah Perangkat Daerah IRBAN I yang dilakukan Penilaian Mandiri SPIP dibagi Jumlah seluruh Perangkat Daerah IRBAN I) X 100%	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi
9	Terlaksananya tugas-tugas yang diberikan atasan	Presentase Terlaksananya tugas-tugas lain yang diberikan atasan (2 kali)	Jumlah penugasan kedinasan lain yang dilaksanakan dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi	Surat Perintah, Nota Dinas, Laporan Hasil Konsultasi

		IRBAN I dibagi Seluruh Penugasan kedinasan lain yang dilaksanakan) x 100%	
--	--	---	--

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR TERAMPIL

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	Jumlah atas terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	terlaksananya Audit (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Audit	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	terlaksananya Reviu (10 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Reviu	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	terlaksananya Monev (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Monev	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop/PKS (2 kali)	Jumlah atas terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop/PKS	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya tindak lanjut Audit internal	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (2 OPD)	Total nilai SAKIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Nilai rata-rata Maturitas SPIP SKPD Level 3 (2 OPD)	Total Nilai Maturitas SPIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR TERAMPIL

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	(Pemenuhan dokumen/data pendukung Penilaian Mandiri pada Elemen PK APIP dibagi Jumlah Total Elemen PK APIP) x 100 %	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Persentase terlaksananya Audit (3 LHP)	(Jumlah atas pelaksanaan Audit dibagi Jumlah target pelaksanaan Audit) x 100%	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	Persentase terlaksananya Reviu (15 LHR)	(Jumlah atas pelaksanaan Reviu dibagi Jumlah target pelaksanaan Reviu) x 100%	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Persentase terlaksananya Monev (6 LHE)	(Jumlah atas pelaksanaan Monev dibagi Jumlah target pelaksanaan Monev) x 100%	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Persentase terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (1 kali)	(Jumlah atas pelaksanaan Diklat/Pelatihan dibagi Jumlah target pelaksanaan Diklat/Pelatihan/PKS) x 100%	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut hasil pengawasan Internal Sesuai Rekomendasi	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan Internal Sesuai Rekomendasi (3 Rekomendasi)	(Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sesuai rekomendasi dibagi jumlah rekomendasi hasil pengawasan) x 100%	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP Pemerintah Daerah dengan nilai sebesar 87 (A)	Nilai rata-rata Hasil Evaluasi SAKIP (12 SKPD)	Total nilai SAKIP SKPD pada IRBAN III dibagi jumlah SKPD pada IRBAN III	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Level 3	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Level 3 (1 kali)	(Jumlah atas pemenuhan dokumen/data dukung penilaian mandiri maturitas SPIP dibagi jumlah dokumen/data yang dibutuhkan pada penilaian mandiri maturitas SPIP) x 100%	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR TERAMPIL

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
2	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
3	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
4	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
5	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
6	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
7	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Sertifikat, Laporan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR TERAMPIL

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	Jumlah terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Terlaksananya Audit (2 Laporan)	Jumlah terlaksananya Audit	Surat Perintah, LHA
3	Terlaksananya Reviu	Terlaksananya Reviu (10 Laporan)	Jumlah terlaksananya Reviu	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Terlaksananya Monev (4 Laporan)	Jumlah terlaksananya Monev	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (1 kali)	Jumlah terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (1 Laporan)	Jumlah terlaksananya tindak lanjut sesuai rekomendasi	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (3 OPD)	Total nilai SAKIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Nilai rata-rata Maturitas SPIP SKPD Level 3 (3 OPD)	Total Nilai Maturitas SPIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : KEPALA SUBBAG. ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

Tugas : a. Melaksanakan administrasi kepegawaian, b. melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha inspektorat, c. melaksanakan urusab perlengkapan, d. melaksanakan urusan rumah tangga, e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan, f. melaksanakan penatausahaan keuangan administrasi keuangan dan perbendaharaan inspektorat. g. melaksanakan verifikasi, akuntansi danpelaporan keuangan dan, h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN (orang dan bulan)	jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan serta laporan dan analisa keuangan dalam setahun	data gaji dan tunjangan ASN
2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang dicetak	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang dicetak dalam setahun	Dokumen Laporan keuangan
3	Terlaksananya penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang dicetak	Jumlah penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang dicetak dalam setahun	Laporan Target keuangan dan fisik serta penyerapan kegiatan
4	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Jumlah APIP yang mengikuti Diklat/pelatihan sesuai Tusinya	Jumlah APIP yang mengikuti Diklat/pelatihan sesuai Tusinya dalam setahun	Kalender diklat, undangan diklat, pelatihan mandiri
5	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan tersedianya sarana dan prasarana kantor	Jumlah laporan tersedianya sarana dan prasarana kantor dalam setahun	Laporan penyediaan sarana dan prasarana
6	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dalam setahun	dokumen pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan unitnya
7	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia dalam setahun	dokumen pengadaan peralatan rumah tangga dan unitnya
8	Terlaksananya Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah jenis mamin yang tersedia	Jumlah penyediaan jenis mamin dalam setahun	kegiatan, rapat, persedian rutin
9	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Jumlah jenis cetakan dan pengandaan yang tersedia	Jumlah jenis cetakan dan pengandaan yang tersedia dalam setahun	laporan, surat menyurat

10	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis media yang berlangganan yang tersedia	Jumlah jenis media yang berlangganan yang tersedia dalam setahun	media
11	Terlaksananya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi	jumlah perjalanan dinas dalam setahun	undangan, rapat, diklat, koordinasi
12	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen pendukung pelaksanaan SPBE	Jumlah dokumen pendukung pelaksanaan SPBE dalam setahun	dokumen pendukung, LHP
13	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah dan jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah dan jenis peralatan kantor yang tersedia dalam setahun	ATK, komputer, printer, laptop
14	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	jumlah penyediaan jasa pengiriman surat dalam setahun	undangan, surat masuk dan keluar
15	Terlaksananya Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Penyediaan tenaga honorer lepas yang terbayarkan	jumlah penyediaan honor yang terbayarkan dalam setahun	THL
16	Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan eselon II yang terpelihara	jumlah kendaraan eselon II yang terpelihara dalam setahun	dokumen pengadaan dan unit kendaraan
17	Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara	jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dalam setahun	dokumen pengadaan dan unit kendaraan
18	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	jumlah dan jenis peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara dalam setahun	unit peralatan dan mesin
19	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang bersertifikat dan disiplin serta fasilitasi administrasi kepegawaian	Jumlah ASN yang bersertifikat dan disiplin serta fasilitasi administrasinya dalam setahun	ASN
20	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam setahun	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
21	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
22	Terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran Kinerja Organisasi	Persentase penyelesaian penugasan/direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan	Persentase penyelesaian penugasan/direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan dalam setahun	aplikasi sipantas, undangan, perintah direktif dari atasan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA

Tugas : a. Melaksanakan koordinasi penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat; b. Mengkoordinasikan penyiapan rencana program kerja pengawasan; c. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum; dan e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam setahun	Dokumen
2	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dalam setahun	Laporan
3	Melaksanakan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan
4	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Laporan
5	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam setahun	Dokumen
6	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dokumen
7	Terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi	Persentase penyelesaian penugasan/direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan	Persentase penyelesaian penugasan/direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan dalam setahun	Laporan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Prosentase terlaksananya fasilitasi perencanaan dan penugasan pengawasan	Dokumen Penyusunan Perencanaan Berbasis Resiko, Peraturan pemerintah, kebijakan pimpinan, permintaan dari SKPD terkait
2	Melaksanakan Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Prosentase terlaksananya fasilitasi perencanaan dan penugasan pengawasan	Dokumen Penyusunan Perencanaan Berbasis Resiko, Peraturan pemerintah, kebijakan pimpinan, permintaan dari SKPD terkait
3	Melaksanakan Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Persentase terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Prosentase terlaksananya fasilitasi perencanaan dan penugasan pengawasan	Dokumen Penyusunan Perencanaan Berbasis Resiko, Peraturan pemerintah, kebijakan pimpinan, permintaan dari SKPD terkait
4	Melaksanakan Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Persentase terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Prosentase terlaksananya fasilitasi perencanaan dan penugasan pengawasan	Dokumen Penyusunan Perencanaan Berbasis Resiko, Peraturan pemerintah, kebijakan pimpinan, permintaan dari SKPD terkait
5	Melaksanakan Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Desa	Persentase terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Desa	Prosentase terlaksananya fasilitasi perencanaan dan penugasan pengawasan	Dokumen Penyusunan Perencanaan Berbasis Resiko, Peraturan pemerintah, kebijakan pimpinan, permintaan dari SKPD terkait
6	Melaksanakan Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Persentase terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Prosentase terlaksananya fasilitasi perencanaan dan penugasan pengawasan	Dokumen Penyusunan Perencanaan Berbasis Resiko, Peraturan pemerintah, kebijakan pimpinan, permintaan dari SKPD terkait
7	Melaksanakan Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan	Prosentase terlaksananya fasilitasi perencanaan dan penugasan pengawasan	Dokumen Penyusunan Perencanaan Berbasis Resiko, Peraturan pemerintah, kebijakan

		Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		pimpinan, permintaan dari SKPD terkait, LHP Pemeriksaan APIP dan BPK, Dokumen TLRHP BPK
8	Melaksanakan Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Prosentase terlaksananya fasilitasi perencanaan dan penugasan pengawasan	Dokumen Penyusunan Perencanaan Berbasis Resiko, Peraturan pemerintah, kebijakan pimpinan, permintaan dari SKPD terkait, pengaduan masyarakat, hasil koordinasi dengan instansi atau institusi lain
9	Melaksanakan Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase terlaksananya fasilitasi perencanaan dan penugasan pengawasan	Dokumen Penyusunan Perencanaan Berbasis Resiko, Peraturan pemerintah, kebijakan pimpinan, permintaan dari SKPD terkait, pengaduan masyarakat, hasil koordinasi dengan instansi atau institusi lain
10	Melaksanakan Perumusan Kebijakan Teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Dokumen Penyusunan Perencanaan Berbasis Resiko, Peraturan pemerintah, kebijakan pimpinan, permintaan dari SKPD terkait, pengaduan masyarakat, hasil koordinasi dengan instansi atau institusi lain, LHP pemeriksaan Internal dan Eksternal
11	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan	Peresentase terlaksananya tugas kedinasan lain yang diberikan atasan	Peresentase terlaksananya tugas kedinasan lain yang diberikan atasan	Disposisi dari pimpinan, direktif dari pimpinan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : STAF PENGADMINISTRASI KEUANGAN

Tugas : Merekap dan membuat daftar Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Membuat daftar Gaji untuk diajukan pembayaran	Prosentase daftar Gaji untuk diajukan pembayaran yang tersedia	Jumlah daftar Gaji untuk diajukan pembayaran yang tersedia x 100%	Data pegawai
2	Mengerjakan tugas administrasi terkait dengan perubahan-perubahan dalam hal penggajian (kenaikan berkala, mutasi, kenaikan pangkat dan lain-lain) baik secara manual maupun elektronik (aplikasi) secara tertib dan teratur	Prosentase perubahan-perubahan dalam hal penggajian (kenaikan berkala, mutasi, kenaikan pangkat dan lain-lain) baik secara manual maupun elektronik (aplikasi) yang sudah terlaksana dan terproses dengan baik	Jumlah perubahan-perubahan dalam hal penggajian (kenaikan berkala, mutasi, kenaikan pangkat dan lain-lain) baik secara manual maupun elektronik (aplikasi) yang sudah terlaksana dan terproses dengan baik x 100%	Berkas perubahan, surat
3	Membuat daftar penerima tunjangan tambahan penghasilan untuk diajukan pembayaran	Prosentase daftar penerima tunjangan tambahan penghasilan untuk diajukan pembayaran yang tersedia	Jumlah daftar penerima tunjangan tambahan penghasilan untuk diajukan pembayaran yang tersedia x 100%	Surat tugas, LHP BPK, dokumen pemantauan TLRHP BPK, LHP APIP, data TGR, dokumen TL dari OPD
4	Mengirim kelengkapan berkas permintaan pembayaran gaji dan TTP	Prosentase berkas permintaan pembayaran gaji dan TTP yang terkirim	Jumlah berkas permintaan pembayaran gaji dan TTP yang terkirim x 100%	Surat permohonan pendampingan, jadwal pengawasan, surat tugas dan laporannya,
5	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan	Prosentase tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan yang dapat terlaksana dengan baik	Jumlah tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan yang dapat terlaksana dengan baik x 100%	aplikasi sipantas, undangan, perintah direktif dari atasan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : STAF PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Melakukan verifikasi, pencatatan dan penerimaan barang inventaris/pakai habis	Jumlah berkas	Jumlah berkas dalam setahun	Dokumen pengadaan, BAST
2	Melakukan penyimpanan barang inventaris / pakai habis agar tidak rusak/cacat	Jumlah barang	Jumlah barang dalam setahun	Daftar inventaris
3	Mendistribusikan barang inventaris/pakai habis kepada unit kerja sesuai rencana kebutuhan	Jumlah jenis barang	Jumlah jenis barang dalam setahun	Daftar kebutuhan dan BAST
4	Memberikan kodefikasi barang sesuai ketentuan	Jumlah barang	Jumlah barang dalam setahun	Daftar inventaris
5	Mendokumentasikan dokumen pengadaan barang sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen dalam setahun	Dokumen pengadaan, BAST
6	Menyimpan bukti-bukti pembelian barang serta bukti pembayaran pemeliharaan barang inventaris	Jumlah berkas	Jumlah berkas dalam setahun	Daftar inventaris
7	Mengirimkan dokumen ke seluruh OPD dan kecamatan	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen dalam setahun	Daftar dokumen dan BAST
8	Melaksanakan penyediaan barang cetakan	Jumlah barang cetakan	Jumlah barang cetakan dalam setahun	Daftar kebutuhan
9	Melaksanakan pengadaan mobil dinas	Jumlah unit mobil dinas	Jumlah unit pengadaan mobil dinas dalam setahun	Daftar pengadaan unit mobil dinas
10	Menyusun rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta barang inventaris/aset daerah pada Inspektorat sesuai skala prioritas	Jumlah barang	Jumlah barang dalam setahun	Daftar usulan kebutuhan barang, inventaris dan dokumen jadwal pemeliharaan sarpras
11	Melaksanakan pemeliharaan mobil dinas	Jumlah unit mobil dinas	Jumlah pemeliharaan mobil dinas dalam setahun	Laporan pemeliharaan mobil
12	Melaksanakan pemeliharaan Peralatan dan mesin	Jumlah unit peralatan dan mesin	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin dalam setahun	Laporan pemeliharaan peralatan dan mesin
13	Tugas tambahan lain dari atasan	Jumlah tugas tambahan lain	Jumlah tugas tambahan lain dalam setahun	Laporan tugas tambahan lain dalam setahun

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : STAF PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN

Tugas : a. Melakukan kegiatan penyusunan dan penelaahan data obyek kerja di bidang laporan keuangan; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan; c. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran; d. Melaksanakan proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; e. Melaksanakan analisis dan evaluasi laporan keuangan; f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan akuntansi serta pelaporan keuangan; g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Menyediakan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran	Prosentase Jumlah bahan penyusunan laporan realisasi anggaran yang siap tersedia	Prosentase Jumlah bahan penyusunan laporan realisasi anggaran yang tersedia	Laporan Realisasi Anggaran
2	Menyediakan bahan penyusunan Laporan Keuangan OPD setiap bulannya	Prosentase Jumlah bahan penyusunan Laporan Keuangan OPD per bulan yang tersedia	Prosentase Jumlah bahan penyusunan Laporan Keuangan OPD per bulan yang tersedia	Laporan Realisasi Anggaran
3	Menyediakan bahan penyusunan Laporan Keuangan OPD setiap Tribulan dan Semester Menyediakan bahan penyusunan Laporan Keuangan OPD setiap Tribulan dan Semester	Prosentase Jumlah bahan penyusunan Laporan Keuangan OPD per Tribulan dan Semester yang tersedia	Prosentase Jumlah bahan penyusunan Laporan Keuangan OPD per Tribulan dan Semester yang tersedia	Laporan Realisasi Anggaran
4	Menyusun Laporan Keuangan untuk Satu Tahun Anggaran	Prosentase Jumlah Laporan Keuangan OPD untuk satu Tahun Anggaran yang tersusun	Prosentase Jumlah Laporan Keuangan OPD untuk Satu Tahun Anggaran yang tersusun	Laporan Realisasi Anggaran
5	Menyediakan bahan penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Prosentase Jumlah bahan penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersedia	Prosentase Jumlah bahan penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersedia	Laporan Keuangan, LRA
6	Melaksanakan proses rekonsiliasi laporan Keuangan OPD	Prosentase Jumlah proses rekonsiliasi laporan Keuangan OPD yang terlaksana	Prosentase Jumlah proses rekonsiliasi Keuangan yang terlaksana	Laporan Keuangan Instansi
7	Menyediakan bahan / materi kegiatan rapat/paparan pimpinan	Prosentase Jumlah bahan / materi untuk kegiatan rapat/paparan oleh pimpinan yang siap tersedia	Prosentase Jumlah bahan / materi untuk kegiatan rapat/paparan oleh pimpinan yang siap tersedia	Laporan Keuangan Instansi, LRA
8	Melaksanakan Tugas Kedinasan yang diberikan oleh atasan	Prosentase Jumlah Tugas Kedinasan lain oleh atasan yang terlaksana dengan baik	Prosentase Jumlah Tugas Kedinasan lain oleh atasan yang Terlaksana dengan baik	Surat Perintah, Undangan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : STAF PENGADMINISTRASI KEUANGAN

Tugas : a. Menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara; b. Mengumpulkan dan menandatangani semua bukti transaksi (SPJ) yang sah dan lengkap atas belanja yang menggunakan Uang Persediaan; c. Menyiapkan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS sesuai Surat Penyediaan Dana (SPD) yang telah ditetapkan dalam APBD; d. Membayar belanja dari Uang Persediaan yang dikelola baik secara tunai dan non tunai; e. Mengetik penerimaan dan pengeluaran keuangan kedalam BKU dan Buku Pembantu BKU sesuai kebutuhan; f. Menyiapkan pemungutan dan penyetoran pajak beserta laporan pajak; g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara	Prosentase dokumen SPJ fungsional yang dapat tercukupi dan tersaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Prosentase dokumen SPJ fungsional yang dicetak dalam setahun	DPA, SPJ Fungsional Bendahara
2	Mengumpulkan dan menandatangani semua bukti transaksi (SPJ) yang sah dan lengkap atas belanja yang menggunakan Uang Persediaan	Prosentase dokumen bukti transaksi (SPJ)	Prosentase bukti transaksi (SPJ) yang ditandatangani dalam setahun	DPA, SPJ belanja beserta bukti pendukungnya
3	Menyiapkan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS sesuai Surat Penyediaan Dana (SPD) yang telah ditetapkan dalam APBD	Prosentase dokumen SPP dan SPM UP/GU/TU/LS	Prosentase SPP dan SPM UP/GU/TU/LS yang dicetak dalam setahun	SPP dan SPM UP/GU/TU/LS
4	Membayar belanja dari Uang Persediaan yang dikelola baik secara tunai dan non tunai	Prosentase pembayaran belanja	Prosentase pembayaran belanja yang dibayar dalam setahun	Internet Banking
5	Mengetik penerimaan dan pengeluaran keuangan kedalam BKU dan Buku Pembantu BKU sesuai kebutuhan	Prosentase pencatatan penerimaan dan pengeluaran	Prosentase pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam setahun	DPA, SPJ belanja beserta bukti pendukungnya
6	Menyiapkan pemungutan dan penyetoran pajak beserta laporan pajak	Prosentase pajak yang dipungut dan disetor	Prosentase pajak yang dipungut dan disetor dalam setahun	Bukti Pungut dan Setor pajak belanja dan Daftar Transaksi Harian Pajak (DTH)
7	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan	Jumlah tugas kedinasan lain yang terlaksana	Jumlah tugas kedinasan lain yang terlaksana dalam setahun	Aplikasi sipantas, undangan, perintah direktif dari atasan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : STAF PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Pengadministrasian Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 Tahun	Laporan Kegiatan
2	Pengadministrasian Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Presentase Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Presentase Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam 1 Tahun	Laporan Kegiatan
3	Pengadministrasian Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Presentase Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Presentase Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dalam 1 Tahun	Laporan Kegiatan
4	Terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran Kinerja organisasi	Persentase penyelesaian penugasan/direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan	Persentase penyelesaian penugasan/direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan dalam 1 tahun	Laporan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : STAF ANALIS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Melakukan Analisa Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Analisa Hasil Pengawasan Kinerja Daerah	Persentase Terlaksananya Analisa Hasil Pengawasan Kinerja Daerah dalam setahun	jadwal pengawasan, surat tugas dan laporannya
2	Melakukan Analisa Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Analisa Pengawasan Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Analisa Pengawasan Keuangan Daerah dalam setahun	jadwal pengawasan, surat tugas dan laporannya
3	Melakukan Analisa Reviu Laporan Kinerja	Persentase Terlaksananya Analisa Reviu Kinerja	Persentase Terlaksananya Analisa Reviu Kinerja dalam setahun	jadwal pengawasan, surat tugas dan laporannya
4	Melakukan Analisa Reviu Laporan Keuangan	Persentase Terlaksananya Analisa Reviu Keuangan	Persentase Terlaksananya Analisa Reviu Keuangan dalam setahun	jadwal pengawasan, surat tugas dan laporannya
5	Melakukan Analisa Laporan Pengawasan Desa	Persentase Terlaksananya Analisa Laporan Pengawasan Desa	Persentase Terlaksananya Analisa Laporan Pengawasan Desa dalam setahun	jadwal pengawasan, surat tugas dan laporannya
6	Melakukan Analisa Kerja Sama Pengawasan Internal	Persentase Terlaksananya Analisa Kerja Sama Pengawasan Internal yang Terbentuk	Persentase Terlaksananya Analisa Kerja Sama Pengawasan Internal yang Terbentuk dalam setahun	jadwal pengawasan, surat tugas dan laporannya
7	Menyusun Analisa Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dalam setahun	Surat tugas, LHP BPK, dokumen pemantauan TLRHP BPK, LHP APIP, data TGR, dokumen TL dari OPD
8	Menyusun Analisa Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah/Negara	Persentase Terlaksananya Analisa Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Persentase Terlaksananya Analisa Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani dalam setahun	jadwal pengawasan, surat tugas dan laporannya
9	Menyusun Analisa Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Terlaksananya Analisa Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Terlaksananya Analisa Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dalam setahun	jadwal pengawasan, surat tugas dan laporannya
10	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan	Persentase terlaksananya tugas kedinasan lain yang diberikan atasan	Persentase terlaksananya tugas kedinasan lain yang diberikan atasan	aplikasi sipantas, undangan, perintah direktif dari atasan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : STAF PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam 1 tahun	Laporan Kegiatan
2	Meningkatnya kualitas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam 1 tahun	Laporan Kegiatan
3	Meningkatnya kualitas Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam 1 tahun	Laporan Kegiatan
4	Meningkatnya kualitas Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Pengawalan OPD Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun	Laporan Kegiatan
5	Meningkatnya kualitas Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Presentase Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Presentase Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam 1 tahun	Laporan Kegiatan
6	Meningkatnya kualitas Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Presentase Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Presentase Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dalam 1 tahun	Laporan Kegiatan
7	Terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran Kinerja organisasi	Persentase penyelesaian penugasan/direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan	Persentase penyelesaian penugasan/direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan dalam 1 tahun	Laporan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : STAF VERIFIKATOR KEUANGAN

Tugas : Melakukan kegiatan verifikasi terhadap dokumen usulan pencairan anggaran

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan pada Inspektorat Kabupaten Gresik sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase tugas pengelolaan administrasi keuangan yang dapat terlaksana dengan baik	Persentase tugas pengelolaan administrasi keuangan yang dapat terlaksana dengan baik dalam setahun	surat perintah, perintah direktif dari atasan
2	Melaksanakan tugas pengelolaan administrasi kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Gresik sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase tugas pengelolaan administrasi kepegawaian yang dapat terlaksana dengan baik	Persentase tugas pengelolaan administrasi kepegawaian yang dapat terlaksana dengan baik dalam setahun	surat perintah, jadwal diklat dan PKS
3	Melaksanakan kewajiban perpajakan Inspektorat Kabupaten Gresik sesuai dengan peraturan yang berlaku	Presentase tugas kewajiban perpajakan yang dapat terlaksana dengan baik	Presentase tugas kewajiban perpajakan yang dapat terlaksana dengan baik dalam setahun	bukti pembayaran pajak
4	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan	Presentasi tugas kedinasan lain yang terlaksana dengan baik	Presentasi tugas kedinasan lain yang terlaksana dengan baik dalam setahun	surat perintah, undangan, perintah direktif dari atasan



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Rencana Strategis (RenStra)

2025-2029



INSPEKTORAT
KABUPATEN GRESIK

INSPEKTORAT GRESIK - DINAMIS

Dedikatif, Interaktif, Normatif, Aplikatif
Maturitas, Integritas, Sinergitas

KABUPATEN GRESIK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunianya, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 dapat tersusun. Penyusunan Renstra Inspektorat Tahun 2025 – 2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029.

Renstra Inspektorat Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan. Renstra ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Gresik.

Kami menyadari bahwa Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik ini belum sempurna, untuk itu mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Diharapkan Renstra Inspektorat ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Gresik, 18 September 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN GRESIK



Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
BAB I. PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	9
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	12
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	19
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	29
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	29
3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	32
3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	34
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	36
4.1 Program kegiatan dan subkegiatan Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029.....	36
BAB V. PENUTUP.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Komposisi Pegawai Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025.....	13
Tabel 2.1.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024.....	16
Tabel 2.2.1	Keselarasan Antara Isu KLHS RPJMD dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.....	27
Tabel 2.2.2	Teknik Menyimpulkan Isu strategis PD.....	28
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD.....	31
Tabel 3.4	Tujuan Sasaran Strategi.....	32
Tabel 3.5	Pentahapan Renstra PD.....	33
Tabel 3.6	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	34
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD.....	37
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	44
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	54
Tabel 4.4.1	Subkegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029.....	60
Tabel 4.5	Subkegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029.....	61
Tabel 4.6	Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	62
Tabel 4.7	Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 –2030.....	65
Tabel 4.8	Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 –2030.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan yang baik sangat diperlukan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan tata pemerintahan yang bersih (clean governance). Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu melakukan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029. Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Proses tersebut telah menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gresik yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategis serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029. Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Inspektorat Kabupaten Gresik yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan setiap tahun sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Gresik. Rangkaian proses penyusunan Renstra Inspektorat dilakukan mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Rangkaian kegiatan penyusunan Renstra diawali dengan penyusunan tim penyusun Renstra yang dituangkan dalam Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Gresik dan kemudian tim ini melakukan rangkaian kegiatan penyusunan diantaranya pengumpulan data, melakukan *focus group discussion* dan melakukan telaah

dokumen terkait yang diperlukan diantaranya dokumen dari instansi vertikal, Renstra BPKP dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergiskan kebijakan Pemerintah Daerah khususnya aspek pengawasan dan pembinaan. Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Inspektorat sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat daerah kabupaten Gresik, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

Landasan hukum penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengadilaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2049;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Gresik;
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan. serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan :

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja perangkat daerah.
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen anggaran (RKA/DPA) perangkat daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

1. Pada bab I berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, dan sistematika penulisan Renstra.
2. Pada bab II berisi uraian atas tinjauan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, yakni Inspektorat Kabupaten Gresik, yang terdiri atas uraian struktur organisasi dan tata kerja, tugas pokok dan fungsi organisasi dan analisis terhadap lingkungan strategis organisasi, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, sumber daya yang dimiliki SKPD, kinerja yang telah dicapai oleh SKPD serta tantangan dan peluang pengembangan SKP, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD berupa identifikasi permasalahan, telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah, telaah tata ruang wilayah dan penentuan isu-isu Strategis.
3. Pada bab III berisi uraian tentang unsur-unsur Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 yang terdiri atas visi dan misi, tujuan dan sasaran beserta indikatornya, strategi dan kebijakan yang akan ditempuh berupa program kegiatan dan sub kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun renstra yakni tahun 2029.
4. Pada bab IV berisi rencana program kegiatan dan sub kegiatan, kinerja serta indikator dan targetnya, kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif.
5. Pada bab V berisi kesimpulan penting substansial, termasuk kaidah pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasinya baik perencanaannya maupun hasilnya, serta transisi rencana kerja setelah berakhirnya renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

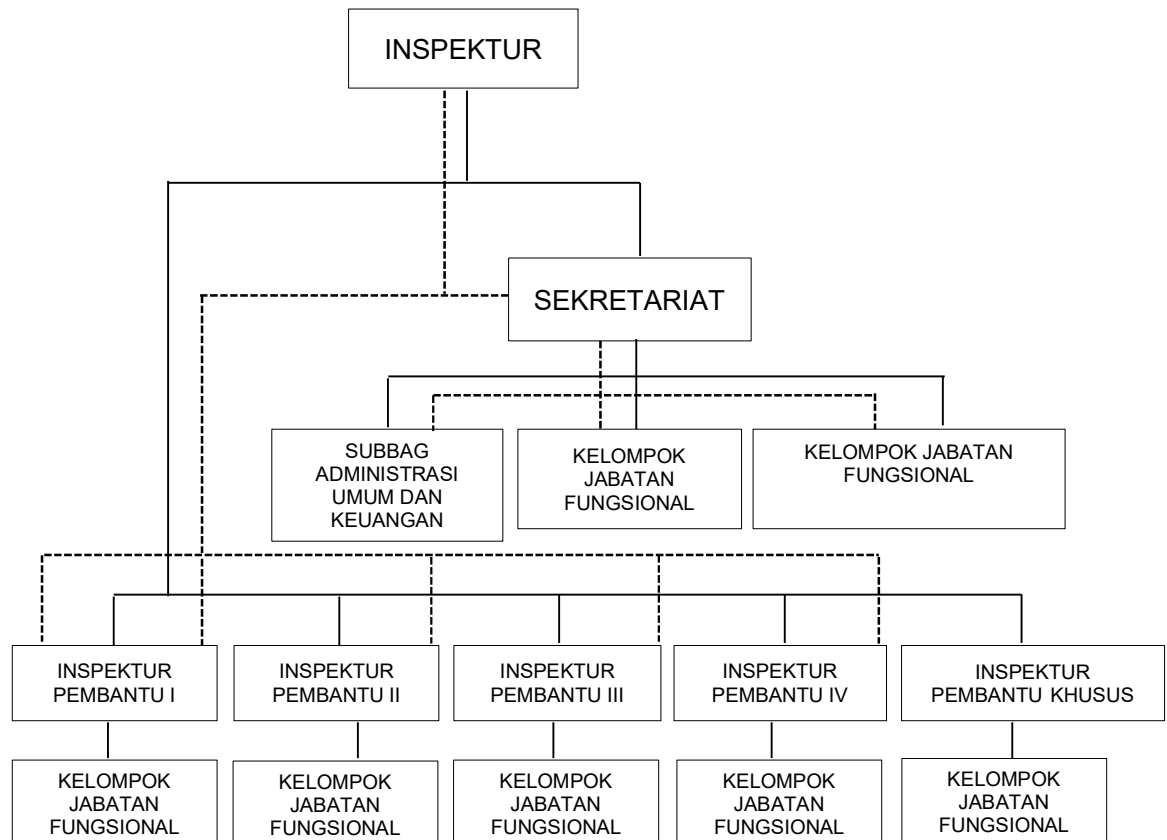
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Gresik ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik. Inspektorat Kabupaten Gresik mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan Desa. Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 adalah terdiri atas :

1. Inspektur ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Inspektur Pembantu I
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu IV
7. Inspektur Pembantu Khusus.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK
(PERDA KAB. GRESIK NOMOR 24 TAHUN 2022)



Dalam penyelenggaraan tugas, Inspektorat Kabupaten Gresik mempunyai tugas yaitu membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, dan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
8. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Inspektorat Kabupaten Gresik dipimpin oleh seorang Inspektur Kabupaten dan dalam menjalankan tugasnya Inspektur Kabupaten dibantu oleh :

a. Sekretariat

Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat meliputi pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Inspektorat Kabupaten dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan;
2. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
3. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ;
4. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
5. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
6. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Kabupaten Gresik membawahi :

- Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV yang mempunyai tugas membantu Inspektur dalam mengkoordinasikan jabatan fungsional auditor dalam

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana desa. Sedangkan Inspektur Pembantu khusus mempunyai tugas membantu inspektur dalam mengkoordinasikan jabatan fungsional untuk melaksanakan tugas koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi pada perangkat daerah.

Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
2. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
5. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
6. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
7. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
8. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
9. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2. Sumber Daya OPD

Sumber daya adalah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat didukung oleh beberapa faktor sumberdaya yang ada sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan yaitu Sumber Daya Manusia.

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi karena

manusia adalah faktor produksi yang dapat mengelola sumber daya organisasi lainnya termasuk manusia itu sendiri sehingga manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi, Tujuan organisasi ini tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif dari Pegawai/karyawan.

Komposisi Pegawai Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 (per 1 September 2025) sebagaimana tabel 2.1.1 berikut :

Tabel 2.1.1 Komposisi Pegawai Inspektorat

Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
	L	P	Jumlah
1. Inspektur	1	-	1
2. Sekretariat			
2.1 Sekretaris	1	-	1
2.1.1 Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	1	-	1
2.1.1.1 Staf Pendukung / fungsional umum	7	7	14
2.1.2 Jabatan Fungsional			
· Fungsional Umum	2	-	2
· Fungsional Perencana Ahli Muda	-	2	2
3. Inspektur Pembantu I	1	-	1
4. Inspektur Pembantu II	1	-	1
5. Inspektur Pembantu III	-	-	0
6. Inspektur Pembantu IV	1	-	1
6. Inspektur Pembantu Khusus	1	-	1
7. Fungsional Auditor/P2UPD			
· Auditor Utama	-	-	0
· Auditor Madya	4	3	7
· Auditor Muda	1	2	3
· Auditor Pertama	5	12	17
· Auditor terampil	2	3	5
· PPUPD Madya	-	1	1
· PPUPD Muda	-	-	0
· PPUPD Pertama	6	4	10
Jumlah ASN	34	34	68
7. Non ASN	3	3	6
JUMLAH	37	37	74

Aparatur Sipil Negara yang ada di Inspektorat menurut golongan terdiri dari :

- Golongan IV, sebanyak 15 orang;
- Golongan III, sebanyak 36 orang;
- Golongan II, sebanyak 11 orang;
- Non Golongan sebanyak 6 orang;

Aparatur Sipil Negara yang ada di Inspektorat menurut eselon terdiri dari :

- a. Eselon II, sebanyak 1 orang;
- b. Eselon III, sebanyak 5 orang;
- c. Eselon IV, sebanyak 1 orang;
- d. Non Eselon, sebanyak 61 orang.

Aparatur Sipil Negara yang ada di Inspektorat menurut tingkat pendidikan terdiri dari :

- a. Pasca Sarjana, sebanyak 12 orang;
- b. Sarjana, sebanyak 45 orang;
- c. D III, sebanyak 8 orang;
- d. SMA, sebanyak 3 orang;
- e. SMP, sebanyak 0 orang.

Aparatur Sipil Negara yang ada di Inspektorat yang bertindak sebagai tenaga pemeriksa terdiri dari :

- a. Tenaga pemeriksa bersertifikasi JFA sebanyak 32 orang, sedangkan PPUPD sebanyak 11 orang.
- b. Tenaga pemeriksa belum sertifikasi JFA, sebanyak 8 orang sedangkan PPUPD sebanyak 8 orang.

1) Sumber Daya Asset/Modal

Aset merupakan sumber daya berwujud yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan memiliki manfaat ekonomis serta digunakan lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Kabupaten Gresik menempati ruangan/gedung Kantor Bupati Gresik Lantai III, menggunakan fasilitas kendaraan dinas dengan rincian sebagai berikut :

- ☐ Kendaraan roda 4 (empat) 8 unit
 - 8 unit dalam kondisi baik.
- ☐ Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 6 unit
 - 6 unit dalam kondisi baik.

Untuk menunjang kegiatan administratif Inspektorat Kabupaten Gresik didukung oleh fasilitas :

- o Komputer PC sebanyak 45 unit.
 - 45 unit dalam kondisi spek baru.

- Note Book/ Laptop 15 unit.

Ketersediaan fasilitas perlengkapan kerja tersebut dinilai kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas seluruh pejabat dan pegawai di jajaran Inspektorat Kabupaten Gresik.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan PD merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah suatu PD telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara keseluruhan, atau merupakan perpaduan dari hasil kerja dan kompetensi, atau alat untuk mengecek apakah organisasi dapat melaksanakan program dengan baik dan mengukur seberapa jauh target-target kinerja dapat dicapai oleh PD dalam kurun waktu tertentu.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik juga harus dilakukan evaluasi. Hal ini dimaksudkan untuk :

- a. Mengevaluasi hasil capaian kinerja Tahun 2020-2024 sebagai entry point dalam penyusunan Renstra 2025-2029;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat berbagai indikator yang dicapai Inspektorat Kabupaten Gresik sebagaimana Tabel 2.1.2 berikut :

Tabel 2.1.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tujan PD	Sasaran PD	IKD RPJ MD	IKD LPP D	SP M	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	✓		✓			0	71,2	74,62	77,34	80,42	0	49,46	51,44	54,92	55,89	69,40%	69,47%	68,93%	71,01%	69,50%	Indikator Tujuan
2	Level kapabilitas APIP		✓				3	3	3	3	3	2	3	3	3	3,085	66,67%	100,00%	100,00%	102,33%	102,83%	Indikator Sasaran
3	Persentase Tindak lanjut selesai sesuai Audit Internal dan Eksternal Berstatus Sesuai Rekomendasi		✓				96,66%	100%	100%	100%	100%	79%	78,30%	80,98%	90,02%	90,66%	81,73%	78,30%	80,98%	90,02%	90,66%	Indikator Sasaran
4	Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD		✓				-	82	82,5	83	86	81,65	82,75	72,47	85,80	86,37	-	1,00915	0,87847	1,03373	1,00429	Indikator Sasaran

5	Nilai maturitas SPIP Pemkab Gresik		✓				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,343	1	1	1	1	1,11433	Indikator Sasaran
6	Persentase ketercapaian sasaran program OPD						-	100%	100%	100%	100%	-	108,43%	139,47%	95,29%	95,07%	-	108,43%	139,47%	95,29%	95,07%	Indikator Program
7	Persentase tindak lanjut audit internal						-	100%	100%	100%	100%	-	100,00%	94,29%	100,00%	100,00%	-	100,00%	94,29%	100,00%	100,00%	Indikator Program
8	Persentase tindak lanjut audit eksternal						-	100%	100%	100%	100%	-	76,26%	78,76%	87,32%	88,41%	-	76,26%	78,76%	87,32%	88,41%	Indikator Program
9	Persentase tindak lanjut aduan masyarakat						-	100%	100%	100%	100%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Indikator Program
10	Nilai evaluasi Internal AKIP OPD dengan persentase minimal A						-	100%	100%	100%	100%	-	100,00%	79,17%	89,13%	86,96%	-	100,00%	79,17%	89,13%	86,96%	Indikator Program

11	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi						-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	-	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	Indikator Program
----	---	--	--	--	--	--	---	-------	-------	-------	-------	---	----------	----------	----------	----------	---	----------	----------	----------	----------	-------------------

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Adanya perkembangan teknologi informasi yang pesat melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik maka mendorong terciptanya suatu tuntutan agar selalu tanggap dan responsif untuk dapat membantu semua pihak mewujudkan akuntabilitas keuangan dan kinerjanya dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah menuju **terwujudnya tata pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntabel dan melayani**. Untuk mengantisipasi adanya perubahan yang sangat cepat, diperlukan kinerja instansi pengawasan yang responsif dan antisipatif. Dengan memperhatikan tantangan tersebut Inspektorat Kabupaten Gresik dituntut untuk menyesuaikan diri melalui peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan ke arah memberikan pelayanan berupa penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) dan pendampingan maupun konsultasi (*Consulting*) serta selalu berupaya tanggap terhadap perubahan-perubahan secara tepat.

Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Gresik menurut Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2022 dan memperhatikan gambaran umum Inspektorat Kabupaten Gresik serta kondisi yang ada baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan dan sarana prasarana yang ada maka ada beberapa kendala dan permasalahan diantaranya :

1. Kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan yang Profesional.

Pembinaan dan pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembinaan dan pengawasan, ketersediaan SDM Inspektorat dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek pemeriksaan (objek). Oleh karena luas wilayah Kabupaten Gresik mencapai 1.192,25 km² yang terdiri dari 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan, entitas objek OPD sebanyak 46 unit, BLUD (RSUD dan Puskesmas) sebanyak 34 unit, UPT dan sekolah sebanyak 424 unit serta BUMD sebanyak 3 unit. ketersediaan sarana mobilitas sangat berpengaruh terhadap lamanya waktu pengawasan. Pada saat ini Inspektorat memiliki 15 kendaraan dinas roda 4 (empat) yang digunakan sebagai sarana mobilitas untuk melakukan pengawasan di 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan se-Kabupaten Gresik, kondisi ini dipandang belum ideal untuk mendukung pengawasan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Gresik dan objek pemeriksaan lainnya, yang dilakukan oleh 4 Inspektur Pembantu Wilayah serta Inspektur Pembantu Khusus

dan Sekretariat Inspektorat, Sebagian kondisi kendaraan dinas kurang baik sehingga kurang memenuhi persyaratan untuk operasional terutama dalam menjangkau lokasi yang jauh dan sulit.

Ketersediaan SDM dan penggunaan aplikasi (tools) menjadi faktor penting dalam pencapaian pembinaan dan pengawasan yang profesional sebagaimana yang telah di rekomendasikan pada masing-masing ANJAB ABK pemeriksanya baik JFA maupun JF PPUPD, untuk mencapai hal tersebut Inspektorat dituntut untuk menyediakan sumberdaya manusia yang berkualitas dan kuantitas yang cukup agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat.

Usaha-usaha yang telah dilakukan adalah perekrutan SDM APIP baru melalui penerimaan CPNS tiap tahun, mengadakan pembuatan dan pengembangan aplikasi pengawasan internal dengan pihak ketiga (aplikasi E-Audit yaitu SIWASTIK) serta mengikutsertakan aparatur Inspektorat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural seperti Diklat Pim Tingkat IV, III, II dan Diklat Fungsional seperti Diklat Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD Tingkat Pertama, Muda dan Madya, Workshop, Seminar, Bimtek serta Diklat-diklat lainnya seperti Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Diklat pengawasan, Diklat Pengadaan Barang/Jasa dan lain sebagainya.

2. Capaian Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja masih perlu di optimalkan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 25 ayat disebutkan “Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan :

- a) Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah ;
- b) Pembinaan dan pengawasan terhadap desa ;

Kemudian dalam pasal 16 ayat (3) disebutkan : “Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah
- d. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan

- e. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah mengawal program dan anggaran daerah maupun desa agar tercipta akuntabilitas kinerja dan keuangan menuju tercapainya pemerintahan yang baik, cerdas, inovatif dan melayani (*good and smart governance*) dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

3. Belum Optimalnya Penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Program dan kegiatan penguatan pengawasan dalam kerangka reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel. SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merupakan salah satu instrumen dari program penguatan pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan merupakan indikasi bahwa SPIP terintegrasi masih belum diterapkan secara efektif dan optimal.

4. Belum Optimalnya Implementasi Penegakan Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Beberapa fungsi pendampingan Inspektorat diantaranya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) belum dapat terwujud pada semua unit kerja. Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK dengan nilai indeks nya yang masih belum stabil, nilai indeks MCP KPK yang masih terdapat beberapa area intervensi yang belum optimal. Inspektorat Kabupaten Gresik berkomitmen secara berkelanjutan melaksanakan fungsi pendampingan dan asistensi dalam meningkatkan integritas dan pencegahan korupsi.

Sebelum menentukan isu strategis diperlukan identifikasi lingkungan eksternal untuk mengetahui kebijakan eksternal yang terkait pengawasan disajikan sebagai berikut:

1. Perpres No. 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025 – 2029

Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

- Sasaran : Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsionalter.

Indikator kinerja terkait Inspektorat Indeks Integritas Nasional. Realisasi indikator tahun 2023 sebesar 70,97, tahun 2025 ditargetkan 74,52 dan tahun 2029 sebesar 77,57.

Sasaran ini dilatarbelakangi Isu meningkatnya tren kasus korupsi yang didominasi pada sektor PBJ (kenaikan mencapai 90% dari tahun 2022 ke tahun 2023).

Hasil SPI dirumuskan dalam bentuk Indeks Integritas Nasional, yang memberikan gambaran umum tingkat integritas di seluruh Indonesia (sumber kpk.go.id). Sejak tahun 2021, KPK mengukur SPI seluruh Kota/Kabupaten termasuk Kabupaten Gresik. Indeks Integritas Pemerintah Kabupaten Gresik masih fluktuatif dari tahun 2021 ke tahun 2024 yang berada pada kategori waspada sampai rentan.

Intervensi Kebijakan :

Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang diarahkan untuk mewujudkan sistem anti korupsi dan anti pencucian uang yang efektif serta sistematis yang dilakukan melalui :

- (a) penguatan kelembagaan gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis,
 - (b) pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui edukasi dan gerakan budaya anti korupsi,
 - (c) pencegahan tindak pidana korupsi serta
 - (d) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- Sasaran : Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani.
Sasaran ini dilatarbelakangi beberapa Isu antara lain Keterpaduan antara layanan publik belum optimal, akses pelayanan publik belum memadai, Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak efektif

Indikator kinerja terkait Inspektorat :

- Indeks Reformasi Birokrasi realisasi tahun 2023 sebesar 69,98 target tahun 2025 sebesar 71,38 dan tahun 2029 sebesar 77,26
- Indeks Pelayanan Publik realisasi tahun 2023 sebesar 3,78, target tahun 2025 sebesar 3,68 dan tahun 2029 sebesar 3,80
- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), untuk target 2026-2030 diganti dengan Indeks Pemerintahan Digital (IPD) pada RPJMD Kabupaten Gresik.

Arah kebijakan : Pemerintah digital, transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan

- Pemerintah digital diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien melalui (a) penguatan tata kelola pemerintah digital, (b) penguatan teknologi pemerintah digital, (c) pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, (d) transformasi digital layanan publik prioritas, serta (e) penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah.
- Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui (a) tata kelola pelayanan publik, (b) penguatan manajemen kinerja pembangunan, serta (c) sinergi pengendalian dan pengawasan program pembangunan nasional.
-

Setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan prioritas dan proyek prioritas. Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah. Berikut Program prioritas (PP) yang terkait kinerja Inspektorat :

Program Prioritas (PP): Transformasi tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan.

Sasaran : terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel.

Kegiatan Prioritas: Penguatan Manajemen Kinerja Pembangunan dengan sasaran terwujudnya kinerja pembangunan yang akuntabel dan berintegritas.

Indikator: Persentase instansi pemerintah dengan nilai akuntabilitas kinerja

baik (kategori B ke atas). Koordinator Kegiatan Prioritas ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kegiatan Prioritas: Sinergi Pengendalian dan pengawasan program pembangunan nasional dengan sasaran terwujudnya sinergi pengendalian dan pengawasan program pembangunan nasional. Indikator : Persentase kab/kota dengan maturitas SPIP terintegrasi dengan karakteristik berbasis terdefinisi (level 3). Koordinator Kegiatan Prioritas ini adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Program Prioritas (PP) : Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sasaran : Terwujudnya sistem antikorupsi dan anti pencucian uang yang efektif serta sistematis dengan indikator Indeks Integritas Nasional, Indeks Perilaku Anti Korupsi PAK, Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang.

Koordinator Program Prioritas ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

2. Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur tahun 2025 – 2026

Perencanaan kinerja yang dituangkan dalam Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

Tujuan nya yaitu Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berintegritas, dengan indikator yaitu Indeks Integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Sasaran ke 1 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator yaitu Nilai SAKIP Inspektorat

Sasaran ke 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator yaitu Opini BPK

Outcome :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat

Indikator :

- Persentase Indikator Program yang tercapai
- Indeks profesionalitas ASN
- Persentase Realisasi Anggaran

2. Meningkatnya Maturitas penyelenggaraan SPIP

Indikator : Level Maturitas SPIP

3. Meningkatnya Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur

Indikator : Level Kapabilitas APIP

Beberapa isu strategis yang dituangkan dalam dokumen Inspektorat Provinsi adalah

1. Meningkatkan kualitas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
 2. Mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MRI) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
 3. Meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui pengembangan kompetensi, Penyusunan pedoman dan standar operasional serta peningkatan independensi APIP
 4. Mendorong pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, transparan dan pasti
 5. Meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi melalui optimalisasi pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP), Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), dan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK.
3. **KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045).**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang lazim disingkat KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan. Terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) kinerja Inspektorat berdampak pada pencapaian tujuan ke-16, yaitu “**Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh**”. Di dalam pedoman teknis penyusunan rencana aksi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kementerian PPN Bappenas disebutkan target dari tujuan ke-16 ini yaitu “secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya”. Dari indikator SDG inilah yang menunjukkan keselarasan SDGs dengan kinerja Inspektorat :

- 16.5.1* Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.
- 16.5.1.[a] Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
- 16.5.2* Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.
- 16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui
- 16.6.1.[a] Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
- 16.6.1.[b] Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) $\geq B$
- 16.6.1.[c] Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) $\geq B$
- 16.6.2.(a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.

4. **RPJMD Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029**

Isu strategis yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2025 -2029 yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Efektif, Transparan, dan Responsif. Salah satu isu yang mendasar adalah belum optimalnya transformasi digital dalam layanan publik di pemerintahan serta perlamabtan reformasi birokrasi. Efektivitas pencegahan dan pengendalian korupsi dan pengawasan intern, termasuk penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), masih menjadi pekerjaan rumah dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif.

Pembangunan sistem birokrasi yang adaptif dan profesionalisme aparatur harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan transformasi digital pemerintahan, peningkatan kapasitas dan integritas ASN melalui sistem merit, penyempurnaan sistem pengawasan dan pengendalian intern, serta penataan sistem data dan informasi pembangunan daerah yang lebih terstruktur dan aman.

Pendekatan ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan Kabupaten Gresik mampu menjawab tantangan masa depan secara efektif, transparan dan responsif.

Isu strategis KLHS RPJMD memiliki sinkronisasi dengan isu strategis RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Hubungan keterkaitannya dituangkan dalam tabel 2.2.1 sebagaimana berikut :

Tabel 2.2.1 Keselarasan Antara Isu KLHS RPJMD dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Keselaraan	KLHS RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029
Isu	Lingkungan hidup dan ketahanan iklim	Penguatan ketangguhan daerah terhadap perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi
	Degradasi lahan dan konversi ruang	
	Pemberdayaan UMKM	Peningkatan kualitas SDM berbasis GEDSI dan SDG's
	Peningkatan layanan kesehatan	
	Penanggulangan kemiskinan	Penanggulangan kemiskinan kronis dan multidimensi
	Kemandirian pangan	
	Pengendalian pertumbuhan penduduk	
	Keterbatasan infrastruktur permukiman	Keselarasn pembangunan wilayah di dukung peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah
	Pemanfaatan teknologi informasi	Transformasi digital dan implementasi smart city
	Tata kelola pemerintahan	Penguatan tata kelola pemerintahan efektif, transparan, dan responsif
	Pengembangan ekonomi daerah	Penguatan tata kelola keuangan daerah dan optimalisasi pendanaan inovatif

Dari telaah terhadap Lingkungan Eksternal dan Internal, terdapat kebijakan yang menjadi perhatian Inspektorat dalam periode ini, yaitu Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Efektif, Transparan, dan Responsif. Diperlukan fondasi yang kokoh melalui percepatan reformasi birokrasi yang menyeluruh, didukung transformasi digital serta implementasi sistem merit pada ASN sebagai elemen kunci. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Efektif, Transparan, dan Responsif menjadi langkah utama meliputi penyusunan kebijakan digital layanan publik yang terintegrasi, pengembangan arsitektur sistem digital pemerintahan, dan evaluasi berkelanjutan atas kinerja sistem merit ASN yang ada. Dari beberapa uraian diatas Inspektorat mengangkat beberapa isu strategis sebagaimana tabel 2.2.2 berikut :

Tabel 2.2.2 Teknik Menyimpulkan Isu strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan yang dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Digitalisasi layanan publik dan sistem merit ASN dapat mempercepat reformasi birokrasi yang transparan.	• Kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan yang profesional. • Capaian Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja masih perlu di optimalkan. • Belum optimalnya Penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. • Belum optimalnya Implementasi Penegakan Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.	Belum efektifnya, transparannya serta responsifnya tata kelola pemerintahan.	Everything is a service (EIS).	Perlindungan terhadap kedaulatan negara.	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik.	• Meningkatkan Kapabilitas APIP (kemampuan dan kapasitas) Untuk pemenuhan Kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan yang profesional. • Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan dengan peningkatan hasil pengawasan dan pemeriksaan (output dan outcome) tata kelola kinerja dan keuangan nya serta peningkatan persentase tindak lanjutnya yang sesuai rekomendasinya. • Mengoptimalkan penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik secara terintegrasi, efektif, efisien dan berkelanjutan. • Mengoptimalkan penerapan penegakan integritas, pencegahan dan pengendalian korupsi (ZI, IEPK, MCP dan SPI KPK) secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
			Remote Work Everywhere.	Peningkatan kemampuan pertahanan negara.		
			Penggunaan Teknologi			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana kabupaten Gresik harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders yang ada di Kabupaten Gresik, maka pernyataan Visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah :

**“Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat
Pertumbuhan Ekonomi untuk kesejahteraan Masyarakat”.**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya kesinambungan yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Gresik secara terpadu. Sehubungan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Gresik yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap perangkat daerah dan pemerintahan desa, maka Inspektorat Kabupaten Gresik berperan dalam mendukung misi Kabupaten Gresik dengan **Tujuan ke- 4 nya Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntabel dan melayani** yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing yaitu :

Misi Ke-4 : Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan berorientasi pada Pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

dengan **Sasaran :** Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit.

Dengan **Indikator kinerja ke - 2 :** Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan.

Sejalan dengan misi dimaksud, Inspektorat Kabupaten Gresik sebagai salah satu elemen dari sistem pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai pengawasan fungsional internal pemerintah, Inspektorat harus mampu *merespon dan bersinergi* terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gresik maupun tujuan dan sasaran pembinaan dan pengawasan instansi vertikal (BPKP, BPK, KPK, IRJEN

KEMENDAGRI, KEMENPAN RB serta APH). Adapun identifikasi tujuan dan sasaran renstra pada Inspektorat Kabupaten Gresik terkait dengan visi dan misi serta program Kepala Daerah terpilih adalah sebagaimana tabel 3.3 berikut

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TAHUN						KET.
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable dan melayani		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	80,62		✓		80,9	81,2	81,5	81,8	82,1	82,4	
		Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	88,41%	✓			90,05%	90,10%	90,15%	90,20%	90,25%	90,30%	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal adalah jumlah rekomendasi atas pemeriksaan keuangan dan kinerja yang ditindaklanjuti yang berstatus telah selesai dibagi jumlah seluruh rekomendasi dikali 100% (seratus persen).
		Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD	86,37	✓			86,57	86,77	86,97	87,17	87,37	87,57	Rata-rata kategori hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah adalah Nilai rata-rata dari total jumlah nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah dibagi jumlah Organisasi Perangkat Daerah.
		Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui PM SPIP Terintegrasi	Nilai maturitas SPIP	3,34	✓			3,35	3,40	3,45	3,50	3,55	3,60	Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi adalah nilai yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada laporan hasil pelaksanaan evaluasinya atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Gresik
			Nilai kapabilitas APIP	3,085	✓			3,095	3,105	3,115	3,125	3,135	3,145	Nilai Kapabilitas APIP adalah nilai yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada laporan hasil pelaksanaan evaluasinya atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Gresik

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan / sasaran Renstra PD. Perumusan strategi dan arah kebijakan Renstra PD disusun sebagai pendekatan dalam pemecahan permasalahan tugas dan fungsi, berdasarkan kerangka kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu jangka menengah. Pernyataan arah dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Gresik, dirumuskan dengan cara menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, untuk memperjelas strategi sehingga lebih fokus (kelompok sasaran/lokus), konkrit, dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran sesuai dengan RPJMD tahun 2025-2029.

Strategi dalam rencana strategis ini memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang disusun dirumuskan dengan sangat memperhatikan hasil dan evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Hasil perumusan strategi pada Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik untuk lima tahun mendatang, adalah sebagaimana tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4 Tujuan Sasaran Strategi

Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntabel dan melayani	Sasaran 1: Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kualitas hasil pengawasan (output dan outcome) dan tindak lanjutnya, kualitas kebijakan pengawasan dan penjaminan kualitasnya terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Daerah agar sesuai Peraturan dan standar yang terbaru
	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas hasil pengawasan (output dan outcome) dan tindak lanjutnya, kualitas kebijakan pengawasan dan penjaminan kualitasnya terhadap tata kelola kinerja Pemerintah Daerah agar sesuai peraturan dan standar yang terbaru
	Sasaran 3: Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui PM SPIP Terintegrasi	Membangun dan mengoptimalkan efektifitas penerapan SPIP, Manajemen Risiko dan IEPK pada tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah secara berkelanjutan
		Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM APIP melalui Peningkatan Kapabilitas (PK) APIP dan manajemen kinerja APIP
		Meningkatkan upaya pencegahan korupsi, penegakan integritas dan reformasi birokrasi.

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Meningkatkan kualitas pendampingan dan asistensi, Penjaminan kualitas (QA) dan fungsi konsultatif (consulting) sesuai peraturan dan standar

Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel 3.5 Pentahapan Renstra PD berikut :

Tabel 3.5 Pentahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Konsolidasi & Penguatan Pengawasan intern (IAC) - Identifikasi gap kapabilitas APIP dan ranking risiko pada OPD - Penyusunan Roadmap penerapan SPIP, Penegakan Integritas dan Pencegahan korupsi serta Peningkatan Kapabilitas APIP - Penerapan pengawasan berbasis risiko secara konsisten pada penyusunan PKPT.	- Penerapan pengawasan berbasis risiko (PKPT) ke seluruh perangkat daerah. - Pembinaan manajemen risiko dan penerapan SPIP Terintegrasi ke level OPD. - Penguatan Audit, reviu, monitoring dan evaluasi tata kelola kinerja dan keuangan pada perangkat daerah prioritas. - Pengembangan dan implementasi SOP dan alat kerja (<i>tools</i>) pengawasan secara efektif dan efisien sesuai standar. (Inovasi aplikasi pengawasan) - Peningkatan kapasitas dan	- Penguatan Fungsi Konsultatif (consulting) dan Mitigasi Risiko Pelaksanaan pengawasan tematik dan lintas sektor. - Penguatan Pendampingan dan Asistensi manajemen risiko dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan pada OPD. - Peningkatan penjaminan kualitas (<i>QA</i>) pengawasan dan hasilnya terutama atas proyek strategis daerah. - Penguatan Pendampingan dan Asistensi pada urusan pemerintahan	- Integrasi hasil audit, reviu, monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan atas program kerja prioritas daerah. - Penguatan pemanfaatan hasil pengawasan dan pemeriksaan untuk pengambilan dan penyusunan kebijakan terbaru. - Penguatan kolaborasi (integrasi), koordinasi dan kerjasama dalam hal pengawasan dan pemeriksaan internal dan Eksternal dengan lembaga dan shareholder terkait	- Evaluasi dan Konsolidasi penyusunan Strategi Baru - Evaluasi capaian roadmap kapabilitas APIP, maturitas SPIP, penegakan integritas dan Pencegahn korupsi - Penyusunan laporan kinerja pengawasan Tahunan dan evaluasinya. - Evaluasi dan rekomendasi untuk roadmap pembinaan, pendampingan dan asistensi, konsultatif dan penjaminan kualitas oleh APIP kedepannya. - Integrasi hasil evaluasi dalam penyusunan Renja, Renstra dan RPJMD baru.

	kualitas SDM melalui rekrutmen CPNS, Diklat, sertifikasi auditor dan PPUPD coaching dengan BPKP, Irjen Kemendagri, IALC KPK, AAIP, BRIN, KemenPAN-RB	n, pembanguna n integritas dan pencegahan korupsi pada OPD.		
--	--	---	--	--

Objek pemeriksaan layanan Rencana Strategis yang dilaksanakan oleh Inspektorat kabupaten Gresik dalam hal ini adalah lokus nya berupa UPT, Sekolah, Desa, Kelurahan, BLUD, BUMD dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik

3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra PD tahun 2025 – 2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disebut NSPK adalah petunjuk untuk melaksanakan urusan wajib dan pilihan. Inspektorat termasuk dalam Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan tidak termasuk dalam urusan wajib dan pilihan. Dalam Tabel 3.4 dituangkan arah kebijakan Inspektorat dalam tahun 2025 – 2029 berdasarkan arah kebijakan RPJMD dan strategi Inspektorat Kabupaten Gresik sebagaimana tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan transparan melalui pengawasan digital, penguatan hukum	Melaksanakan sistem peringatan dini (early warning sistem) pada tata kelola penyelenggaraan pemerintahan agar tidak terjadi penyimpangan (fraud) terhadap peraturan dan standar yang berlaku	
2			Melaksanakan penjaminan kualitas (QA) penyelenggaraan tata kelola kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai standar yang berlaku	
3			Melaksanakan Jasa Konsultansi (consulting), Hasil Pengawasan yang Efektif atau Berkualitas	

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
4		administrasi negara, serta kepemimpinan yang berorientasi hasil.	Penguatan Pendampingan dan asistensi pada urusan pemerintahan, reformasi birokrasi, pembangunan integritas dan pencegahan korupsi	
5			Meningkatkan akuntabilitas pelaporan kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai standar berlaku	
6			Monev kualitas hasil pengawasan dan pemeriksaan (output dan outcome) secara berkelanjutan	
7			Meningkatkan kualitas kebijakan pengawasan sesuai standar terbaru	
8			Penguatan independensi Inspektorat dalam melakukan Pengawasan Intern melalui Piagam Pengawasan Intern (IAC) dan Penerapan PKPT berbasis risiko	
9			Optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, penerapan SPIP terintegrasi, Manajemen Risiko dan RTP fraud	
10			Penguatan SDM dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM APIP melalui rekrutmen CPNS, diklat, bimtek PKS minimal 120 jam per tahun per orang secara berkelanjutan	
11			Integrasi hasil audit, reviu, monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan terhadap kebijakan program kerja prioritas daerah	
12			Inovasi pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan tata kelola pemerintahan secara digital (Implementasi aplikasi pengawasan)	
13			Meningkatkan kualitas sistem pemerintahan digital dengan melaksanakan Audit TIK SPBE (infrastruktur, aplikasi dan keamanan)	
14			Penguatan kolaborasi (integrasi), koordinasi dan kerjasama dalam hal pengawasan dan pemeriksaan internal dan eksternal serta pengaduan masyarakat dengan lembaga dan shareholder terkait (APH, Inspektorat Provinsi, BPK, BPKP, KPK dan Irjen Kemendagri)	
15			Meningkatkan kualitas hasil evaluasi kinerja inspektorat oleh pihak intern maupun eksternal secara berkelanjutan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program kegiatan dan subkegiatan Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Inspektorat Kabupaten Gresik sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Berikut disajikan tabel 4.2 tentang rencana program, kegiatan beserta pagu indikatif pada periode tahun Renstra (2025-2029), yang selanjutnya harus dipedomani dalam penyusunan rencana kerja tahunan Inspektorat Daerah

Tabel 4. 2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT							
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (LHE INTERNAL) (Nilai)		
		Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah			Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal (%)		
			Meningkatnya kinerja dan keuangan pemerintahan daerah, dan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti		Persentase nilai evaluasi Internal AKIP OPD minimal A (Angka)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
					Persentase tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
					Persentase tindak lanjut audit eksternal (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
					Persentase tindak lanjut audit internal (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Laporan kinerja dan keuangan pemerintahan daerah, dan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	

					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	

				Laporan kinerja dan keuangan pemerintahan daerah, dan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
		Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja dan keuangan pemerintahan daerah, dan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti			Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)		
						Persentase nilai evaluasi Internal AKIP OPD minimal A (Angka)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
						Persentase tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
						Persentase tindak lanjut audit eksternal (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
					Persentase tindak lanjut audit internal (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
				Laporan kinerja dan keuangan pemerintahan daerah, dan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal		

					yang Terbentuk (Kesepakatan)		
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Laporan kinerja dan keuangan pemerintahan daerah, dan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	

					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui PM SPIP Terintegrasi			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Nilai maturitas SPIP (Nilai)		
					Nilai kapabilitas APIP (Nilai)		
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi			Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
					Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi (%)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang	6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	

					Disusun (Rekomendasi)		
				Laporan pendampingan dan asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	

					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

Tabel 4. 3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERAN GAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				31.752.718.3 55,25		31.915.458 .000		32.861.996 .000		34.068.735 .000		35.775.478 .000		36.867.660 .000	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.579.538.7 55,25		18.674.763 .000		19.228.613 .000		19.934.715 .000		20.933.385 .000		21.572.456 .000	
Meningkatnya ketercapaian sasaran Program OPD	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	95,07	95,10	18.579.538.7 55,25	95,35	18.674.763 .000	95,65	19.228.613 .000	95,95	19.934.715 .000	96,25	20.933.385 .000	96,55	21.572.456 .000	
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				268.350.000		265.678.00 0		266.215.91 1		266.215.91 1		296.215.91 1		296.215.91 1	
Jenis Laporan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	7	3	268.350.000	3	265.678.00 0	3	266.215.91 1	3	266.215.91 1	7	296.215.91 1	7	296.215.91 1	
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				226.194.600		223.194.60 0		223.194.60 0		223.194.60 0		253.194.60 0		253.194.60 0	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	6	226.194.600	6	223.194.60 0	6	223.194.60 0	6	223.194.60 0	6	253.194.60 0	6	253.194.60 0	
6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				19.123.600		19.287.600		19.825.511		19.825.511		19.825.511		19.825.511	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	19.123.600	2	19.287.600	2	19.825.511	2	19.825.511	2	19.825.511	2	19.825.511	

6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23.031.800		23.195.800		23.195.800		23.195.800		23.195.800		23.195.800	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	23.031.800	1	23.195.800	1	23.195.800	1	23.195.800	1	23.195.800	1	23.195.800	
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.596.414.895		9.827.635.182		10.130.947.271		10.037.049.271		10.555.719.271		10.777.609.126	
Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24	3	9.596.414.895	3	9.827.635.182	3	10.130.947.271	3	10.037.049.271	3	10.555.719.271	3	10.777.609.126	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.566.234.895,25		9.798.355.182		10.101.667.271		10.007.769.271		10.518.695.232		10.740.585.087	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	46	46	9.566.234.895,25	62	9.798.355.182	62	10.101.667.271	62	10.007.769.271	62	10.518.695.232	62	10.740.585.087	
6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				24.420.000		23.520.000		23.520.000		23.520.000		23.520.000		23.520.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	2	24.420.000	2	23.520.000	2	23.520.000	2	23.520.000	2	23.520.000	2	23.520.000	
6.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				5.760.000		5.760.000		5.760.000		5.760.000		13.504.039		13.504.039	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	1	5.760.000	1	5.760.000	1	5.760.000	1	5.760.000	1	13.504.039	1	13.504.039	
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.390.108.600		2.004.208.600		2.004.208.600		2.004.208.600		2.104.208.600		2.304.208.600	

Jenis Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	1	2.390.108.600	1	2.004.208.600	1	2.004.208.600	1	2.004.208.600	1	2.104.208.600	1	2.304.208.600	
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.390.108.600		2.004.208.600		2.004.208.600		2.004.208.600		2.104.208.600		2.304.208.600	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	39	28	2.390.108.600	44	2.004.208.600	44	2.004.208.600	44	2.004.208.600	44	2.104.208.600	44	2.304.208.600	
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.198.553.220		3.840.544.438		3.940.544.438		3.940.544.438		4.240.544.438		4.457.725.583	
Jenis Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	5	4.198.553.220	5	3.840.544.438	5	3.940.544.438	5	3.940.544.438	5	4.240.544.438	5	4.457.725.583	
6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				210.759.800		133.759.000		133.759.000		133.759.000		333.759.000		333.759.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	54	50	210.759.800	50	133.759.000	50	133.759.000	50	133.759.000	50	333.759.000	50	333.759.000	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	0	0	0	0	4	100.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				534.995.100		534.732.218		534.732.218		534.732.218		534.732.218		534.732.218	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	6	534.995.100	6	534.732.218	6	534.732.218	6	534.732.218	6	534.732.218	6	534.732.218	
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				91.822.100		90.022.100		90.022.100		90.022.100		90.022.100		90.022.100	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	10	91.822.100	10	90.022.100	10	90.022.100	10	90.022.100	10	90.022.100	10	90.022.100	

6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				51.611.000		51.611.100		51.611.100		51.611.100		51.611.100		51.611.100	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6	6	51.611.000	6	51.611.100	6	51.611.100	6	51.611.100	6	51.611.100	6	51.611.100	
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.360.049.52 0		833.007.52 0		833.007.52 0		883.007.52 0		983.007.52 0		983.007.52 0	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	259	150	1.360.049.52 0	155	833.007.52 0	160	833.007.52 0	165	883.007.52 0	170	983.007.52 0	175	983.007.52 0	
6.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.949.315.70 0		2.197.412. 500		2.197.412. 500		2.197.412. 500		2.197.412. 500		2.414.593. 645	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	1.949.315.70 0	1	2.197.412. 500	1	2.197.412. 500	1	2.197.412. 500	1	2.197.412. 500	1	2.414.593. 645	
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				649.731.840		508.876.58 0	1	608.876.58 0		1.408.876. 580		1.058.876. 580		1.058.876. 580	
Jenis Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55	1	649.731.840	1	508.876.58 0	1	608.876.58 0	1	1.408.876. 580	1	1.058.876. 580	1	1.058.876. 580	
6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		800.000.00 0		450.000.00 0		450.000.00 0	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	2	800.000.00 0	1	450.000.00 0	1	450.000.00 0	
6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		0		100.000.00 0		100.000.00 0		100.000.00 0		100.000.00 0	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	5	100.000.00 0	5	100.000.00 0	5	100.000.00 0	5	100.000.00 0	
6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				649.731.840		508.876.58 0		508.876.58 0		508.876.58 0		508.876.58 0		508.876.58 0	

Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	55	50	649.731.840	50	508.876.580	49	508.876.580	48	508.876.580	47	508.876.580	46	508.876.580	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				293.918.000		293.918.000		293.918.000		293.918.000		293.918.000		293.918.000	
Jenis Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	2	293.918.000	2	293.918.000	2	293.918.000	2	293.918.000	2	293.918.000	2	293.918.000	
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				11.990.000		11.990.000		11.990.000		11.990.000		11.990.000		11.990.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	11.990.000	2	11.990.000	2	11.990.000	2	11.990.000	2	11.990.000	2	11.990.000	
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0		0		0		0		0		0	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				281.928.000		281.928.000		281.928.000		281.928.000		281.928.000		281.928.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	8	281.928.000	8	281.928.000	8	281.928.000	8	281.928.000	8	281.928.000	8	281.928.000	
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.182.462.200		1.933.902.200		1.983.902.200		1.983.902.200		2.383.902.200		2.383.902.200	
Jenis Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	3	1.182.462.200	3	1.933.902.200	3	1.983.902.200	3	1.983.902.200	3	2.383.902.200	3	2.383.902.200	

6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				104.920.900		206.360.90 0		206.360.90 0		206.360.90 0		206.360.90 0		206.360.90 0	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	104.920.900	1	206.360.90 0	1	206.360.90 0	1	206.360.90 0	1	206.360.90 0	1	206.360.90 0	
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				939.359.500		1.239.359. 500		1.239.359. 500		1.239.359. 500		1.539.359. 500		1.539.359. 500	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERAN GAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	16	939.359.500	16	1.239.359. 500	16	1.239.359. 500	16	1.239.359. 500	16	1.539.359. 500	16	1.539.359. 500	
6.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	0	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				116.149.800		316.149.80 0		316.149.80 0		316.149.80 0		416.149.80 0		416.149.80 0	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100	50	116.149.800	50	316.149.80 0	50	316.149.80 0	50	316.149.80 0	50	416.149.80 0	50	416.149.80 0	
6.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.032.000		172.032.00 0		172.032.00 0		172.032.00 0		172.032.00 0		172.032.00 0	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	22.032.000	1	172.032.00 0	1	172.032.00 0	1	172.032.00 0	1	172.032.00 0	1	172.032.00 0	

6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				4.417.292.200		4.439.932.000		4.571.610.000		4.739.486.000		4.976.920.000		5.128.859.000	
Meningkatnya kinerja dan keuangan pemerintahan daerah, dan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Persentase nilai evaluasi Internal AKIP OPD minimal A (Angka)	86,96	87,25	4.417.292.200	87,5	4.439.932.000	87,75	4.571.610.000	88,00	4.739.486.000	88,25	4.976.920.000	88,50	5.128.859.000	
	Persentase tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan (%)	100	100		100		100		100		100				
	Persentase tindak lanjut audit eksternal (%)	88,41	88,45		88,5		88,55		88,6		88,65				
	Persentase tindak lanjut audit internal (%)	100	100		100		100		100		100				
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				4.224.612.100		4.166.315.900		4.287.993.900		4.455.869.900		4.663.303.900		4.815.242.900	
Laporan kinerja dan keuangan pemerintahan daerah, dan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	7	7	4.224.612.100	7	4.166.315.900	7	4.287.993.900	7	4.455.869.900	7	4.663.303.900	7	4.815.242.900	
	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Eksternal	1	1		1		1		1		1				
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				1.135.049.100		1.146.194.100		1.196.194.100		1.196.194.100		1.326.194.100		1.326.194.100	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	26	35	1.135.049.100	46	1.146.194.100	25	1.196.194.100	26	1.196.194.100	27	1.326.194.100	28	1.326.194.100	
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				27.999.900		83.182.166		103.182.166		153.182.166		283.182.166		373.182.166	
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	14	35	27.999.900	12	83.182.166	15	103.182.166	16	153.182.166	17	283.182.166	18	373.182.166	
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				460.902.000		78.607.000		98.607.000		205.345.185		255.345.185		355.345.185	
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	43	22	460.902.000	15	78.607.000	40	98.607.000	41	205.345.185	42	255.345.185	43	355.345.185	
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				28.607.000		589.658.000		639.658.000		689.658.000		789.658.000		939.658.000	
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	136	60	28.607.000	70	589.658.000	115	639.658.000	116	689.658.000	117	789.658.000	118	939.658.000	
6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa				59.261.000		113.165.000		163.165.000		163.165.000		243.165.000		268.165.000	

Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6	16	59.261.000	12	113.165.00 0	6	163.165.00 0	7	163.165.00 0	8	243.165.00 0	9	268.165.00 0	
6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal				1.600.283.70 0		1.264.000. 100		1.264.000. 100		1.264.000. 100		1.314.000. 100		1.314.000. 100	
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	2	1	1.600.283.70 0	1	1.264.000. 100	1	1.264.000. 100	1	1.264.000. 100	1	1.314.000. 100	1	1.314.000. 100	
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				912.509.400		891.509.53 4		823.187.53 4		784.325.34 9		451.759.34 9		238.698.34 9	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	12	4	912.509.400	4	891.509.53 4	4	823.187.53 4	4	784.325.34 9	4	451.759.34 9	4	238.698.34 9	
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				192.680.100		273.616.10 0		283.616.10 0		283.616.10 0		313.616.10 0		313.616.10 0	
Laporan kinerja dan keuangan pemerintahan daerah, dan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dan aduan masyarakat	2	2	192.680.100	2	273.616.10 0	2	283.616.10 0	2	283.616.10 0	2	313.616.10 0	2	313.616.10 0	
6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				179.090.600		93.589.500		103.589.50 0		103.589.50 0		113.589.50 0		113.589.50 0	
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	5	12	13.589.500	12	93.589.500	12	103.589.50 0	12	103.589.50 0	12	113.589.50 0	12	113.589.50 0	
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						180.026.60 0		180.026.60 0		180.026.60 0		200.026.60 0		200.026.60 0	
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	11	12	179.090.600	12	180.026.60 0	12	180.026.60 0	12	180.026.60 0	12	200.026.60 0	12	200.026.60 0	
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				8.755.887.40 0		8.800.763. 000		9.061.773. 000		9.394.534. 000		9.865.173. 000		10.166.345. 000	

Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi (%)	100	100	8.755.887.400	100	8.800.763.000	100	9.061.773.000	100	9.394.534.000	100	9.865.173.000	100	10.166.345.000	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3	3		3		3		3		3		3		
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				121.102.200		221.150.300		221.150.300		221.150.300		250.150.300		250.150.300	
Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Jenis Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1	1	121.102.200	1	221.150.300	1	221.150.300	1	221.150.300	1	250.150.300	1	250.150.300	
6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				121.102.200		221.150.300		221.150.300		221.150.300		250.150.300		250.150.300	
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	5	5	121.102.200	5	221.150.300	5	221.150.300	5	221.150.300	5	250.150.300	5	250.150.300	
6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				0		0		0		0		0		0	
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				8.634.785.200		8.579.612.700		8.840.622.700		9.173.383.700		9.615.022.700		9.916.194.700	
Laporan pendampingan dan asistensi	Jumlah Jenis Laporan Pendampingan dan Asistensi	46	4	8.634.785.200	4	8.579.612.700	4	8.840.622.700	4	9.173.383.700	4	9.615.022.700	4	9.916.194.700	

6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				2.960.038.000		2.936.056.890		3.085.056.890		3.185.056.890		3.385.056.890		3.485.056.890	
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	46	46	2.960.038.000	46	2.936.056.890	46	3.085.056.890	46	3.185.056.890	46	3.385.056.890	46	3.485.056.890	
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				102.394.000		106.499.000		156.499.000		156.499.000		176.499.000		176.499.000	
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	0	46	102.394.000	46	106.499.000	46	156.499.000	46	156.499.000	46	176.499.000	46	176.499.000	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4.601.943.700		4.582.255.200		4.779.255.200		4.779.255.200		4.879.255.200		4.929.255.200	
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	7	5	4.601.943.700	5	4.582.255.200	5	4.779.255.200	5	4.779.255.200	5	4.879.255.200	5	4.929.255.200	
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				970.409.500		954.801.610		819.811.610		1.052.572.610		1.174.211.610		1.325.383.610	
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	46	46	970.409.500	46	954.801.610	46	819.811.610	46	1.052.572.610	46	1.174.211.610	46	1.325.383.610	

Inspektorat mengampu 2 program prioritas yang mendukung pembangunan daerah yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berdasrkan Sub Navigasi Nawakarsanya.

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

N o	Nawaka rsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)		Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Gresik Tuntas Tanggap, Unggul, Nyaman, Transpar an, Akuntabl e, dan Sustaina ble	Gresik <i>Integrat ed Smart System</i>	Sistem satu data terpadu yang menginteg rasi seluruh data Pembangu nan baik layanan dasar maupun sectoral secara numerik dan spasial serta membentu k big data	Meningkat nya ketercapaia n sasaran Program OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/K OTA			95,10 %	95,35 %	95,65 %	95,95 %	96,25 %	95,55 %
						Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3	3	3	3	7	7
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	6	6	6	6

[illegible]

						Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah		1	1	1	1	1	1
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28	44	44	44	44	44
						Administra si Umum Perangkat Daerah		5	5	5	5	5	5
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50	50	50	50	50	50
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	4	2	2	2
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6	6	6	6	6	6
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10	10	10	10	10	10
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	6	6	6	6	6	6

		Gresik Rembug Akur	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	155	160	165	170	175
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1	1	1	1
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	1	1	1	1
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	2	1	1
							0	0	5	5	5	5
							50	50	49	48	47	46
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	2	2	2	2	2

						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2	2	2	2	2
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0	0	0	0
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8	8	8	8	8	8
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3	3	3	3	3	3
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	1	1	1	1	1

						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16	16	16	16	16	16
						Pemeliharaan Mebel	0	0	10	10	10	10
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50	50	50	50	50	50
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	1	1	1	1

Tabel 4.4.1 Subkegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

**Daftar Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
INSPEKTORAT**

No	SubKegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 7												
Kegiatan Prioritas Utama : Pemberantasan Korupsi yang bersifat Preventif melalui Edukasi dan Gerakan Budaya Antikorupsi												
1	6.01.03.2.02.0003-Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Laporan kegiatan)	5	4.582.255.200	5	4.779.255.200	5	4.779.255.200	5	4.879.255.200	5	4.929.255.200	Inspektorat

Tabel 4.5 Subkegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dukungan Proyek Strategis Nasional

No	Program Strategis Nasional/Proyek Prioritas Nasional/SubKegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Program Strategis : Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)												
Proyek Prioritas : Gerakan Budaya Antikorupsi												
1	6.01.03.2.02.003-Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Laporan kegiatan)	5	4.582.255.200	5	4.779.255.200	5	4.779.255.200	5	4.879.255.200	5	4.929.255.200	Inspektorat

Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

No	SubKegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Asta Cita : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.												
Outcome Prioritas : Meningkatkan kinerja dan keuangan pemerintahan daerah, dan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti												
1	6.01.02.2.01.0001 -Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	46	1.146.194.100	25	1.196.194.100	26	1.196.194.100	27	1.326.194.100	28	1.326.194.100	Inspektora t
2	6.01.02.2.01.0002 -Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12	83.182.166	15	103.182.166	16	153.182.166	17	283.182.166	18	373.182.166	Inspektora t
3	6.01.02.2.01.0003 -Reviu Laporan Kinerja	15	78.607.000	40	98.607.000	41	205.345.185	42	255.345.185	43	355.345.185	Inspektora t
4	6.01.02.2.01.0004 -Reviu Laporan Keuangan	70	589.658.000	115	639.658.000	116	689.658.000	117	789.658.000	118	939.658.000	Inspektora t
5	6.01.02.2.01.0005 -Pengawasan Desa	12	113.165.000	6	163.165.000	7	163.165.000	8	243.165.000	9	268.165.000	Inspektora t
6	6.01.02.2.01.0006 -Kerja Sama Pengawasan Internal	1	1.264.000.100	1	1.264.000.100	1	1.264.000.100	1	1.314.000.100	1	1.314.000.100	Inspektora t

No	SubKegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
7	6.01.02.2.01.0007 -Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	891.509.534	4	823.187.534	4	784.325.349	4	451.759.349	4	238.698.349	Inspektora t
8	6.01.02.2.02.0001 -Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12	93.589.500	12	103.589.500	12	103.589.500	12	113.589.500	12	113.589.500	Inspektora t
9	6.01.02.2.02.0002 -Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	12	180.026.600	12	180.026.600	12	180.026.600	12	200.026.600	12	200.026.600	Inspektora t
Outcome Prioritas : Meningkatnya kualitas pendampingan, asistensi dan perumusan kebijakan												
1	6.01.03.2.01.0001 -Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	5	221.150.300	5	221.150.300	5	221.150.300	5	250.150.300	5	250.150.300	Inspektora t
2	6.01.03.2.01.0002 -Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Inspektora t

No	SubKegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
3	6.01.03.2.02.0001 -Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	46	2.936.056.890	46	3.085.056.890	46	3.185.056.890	46	3.385.056.890	46	3.485.056.890	Inspektora t
4	6.01.03.2.02.0002 -Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	46	106.499.000	46	156.499.000	46	156.499.000	46	176.499.000	46	176.499.000	Inspektora t
5	6.01.03.2.02.0003 -Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Laporan kegiatan)	5	4.582.255.200	5	4.779.255.200	5	4.779.255.200	5	4.879.255.200	5	4.929.255.200	Inspektora t
6	6.01.03.2.02.0004 -Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	46	954.801.610	46	819.811.610	46	1.052.572.610	46	1.174.211.610	46	1.325.383.610	Inspektora t

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.

Tabel 4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 –2030

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Awal Tahun 2025	Target						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	Persen	90,70%	90,05%	90,10%	90,15%	90,20%	90,25%	90,30%	90,25%
2	Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD	Angka	87	86,57	86,77	86,97	87,17	87,37	87,57	87,37
3	Nilai maturitas SPIP	Angka	3,280	3,35	3,40	3,45	3,50	3,55	3,60	3,55
4	Nilai kapabilitas APIP	Angka	3,090	3,095	3,105	3,115	3,125	3,135	3,145	3,135

Indikator kinerja tujuan dan sasaran kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 kemudian Indikator kinerja ini yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat setiap tahun. Dengan Indikator Kinerja Utama, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat diukur guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas secara kualitatif dari keberhasilan Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama penyelenggaraan bidang urusan pengawasan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tabel 4.7.

Selain Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) pemerintah daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. IKK adalah ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang digunakan untuk mengukur pencapaian target dan kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). IKK membantu pemerintah daerah untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. IKK yang terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan dituangkan sebagaimana tabel 4.8.

Tabel 4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 –2030

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Awal Tahun 2025	Target						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	Persen	90,70%	90,05%	90,10%	90,15%	90,20%	90,25%	90,30%	90,25%
2	Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD	Angka	87	86,57	86,77	86,97	87,17	87,37	87,57	87,37
3	Nilai maturitas SPIP	Angka	3,280	3,35	3,40	3,45	3,50	3,55	3,60	3,55
4	Nilai kapabilitas APIP	Angka	3,090	3,095	3,105	3,115	3,125	3,135	3,145	3,135

No.	Indikator Kinerja Daerah	SATUAN	Target Awal Tahun 2025	Target						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84,77	86,17	86,71	87,24	87,76	88,28	88,8	88,28
2	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	Nilai		80,9	81,2	81,5	81,8	82,1	82,4	82,1

BAB V

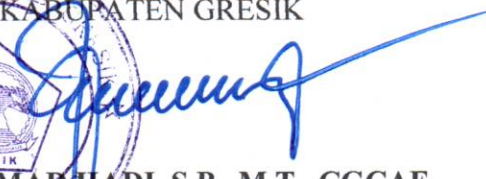
PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gresik tahun 2025 - 2029 telah mempertimbangkan berkembangnya konsep pengelolaan organisasi dan perubahan paradigma bagi Inspektorat. Renstra Inspektorat telah memuat kebijakan dan program yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kebijakan terkait pengawasan lainnya. Renstra Inspektorat diharapkan dapat mengarahkan Aparat Pengawasan Internal atau Inspektorat dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat tercapai indikator kinerja yang diharapkan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut dibutuhkan peran aktif seluruh aparat pengawasan dan stakeholder yang terkait. Aparat pemeriksa yang kompeten, integritas, adaptif dan profesional sangat penting dalam pencapaian keberhasilan yang diharapkan.

Dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik selain sebagai pedoman dalam menyusun Renja Inspektorat Kabupaten Gresik, juga digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik untuk periode tahunan dan lima tahunan atau akhir tahun perencanaan strategis.

Akhir kata semoga penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good and clean governance.

Gresik, 18 September 2025


INSPEKTUR
KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

NOTA DINAS

Kepada : Yth. 1. Sekretaris
2. Inspektur Pembantu I, II, III, IV, Khusus
3. Auditor Madya & Muda
4. P2UPD Madya

Dari : Inspektur

Sifat : Penting

Nomor : 005/679/437.72/2025

Tanggal : 8 April 2025

Perihal : Undangan

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 9 April 2025

Waktu : 08.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Saber Pungli

Acara : Rapat Koordinasi Evaluasi dan Rencana Pengawasan

Demikian atas perhatian dan pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

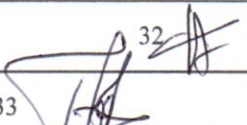
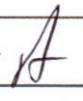
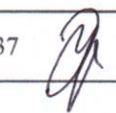
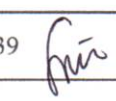
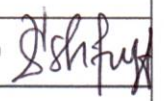
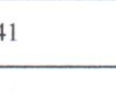
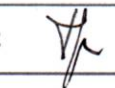
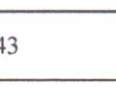
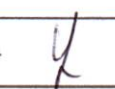
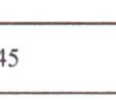
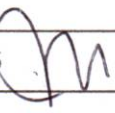
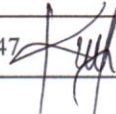
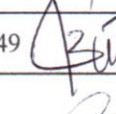
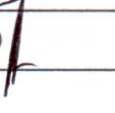
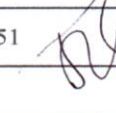
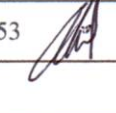
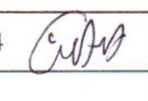
Inspektur,



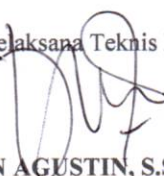
Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 197401011998031013

DAFTAR HADIR PESERTA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr, ACHMAD HADI, SP., MT.	L	Inspektur Kabupaten Gresik	1
2	JONATAN MARKUS, SH., MH.	L	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Gresik	2
3	SATRIYO UTOMO, S.Sos., M.Si.	L	Inspektur Pembantu I	3
4	Drs. NURUL MUCHID, M.Si.	L	Inspektur Pembantu II	4
5	J. GANDJUR A, S.Sos, MM.	L	Inspektur Pembantu IV	5
6	Drs. ABD.MAJID, M.M.	L	Inspektur Pembantu Khusus	6
7	AGUS WIDODO, A.Md.	L	Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan	7
8	NUR HAERONI, SE.	L	Perencana Ahli Muda	8
9	DIAN AGUSTIN, S.STP.	P	Perencana Ahli Muda	9
10	SUWONO, SH, MM.	P	Auditor Ahli Madya	10
11	AJI PRAYITNO, ST.	L	Auditor Ahli Madya	11
12	MUSDALIFAH, SE.	P	Auditor Ahli Madya	12
13	Drs. DEDY MAHDIE, MAP.	L	Auditor Ahli Madya	13
14	SITI KOMARIAH, SE.	P	Auditor Ahli Madya	14
15	NI PUTU TRISNA A, SH	P	Auditor Ahli Madya	15
16	WAKIDAH KURNIASTUTI, SE., MT.	P	P2UPD Ahli Madya	16
17	DARWIS, SH.	L	Auditor Ahli Madya	17
18	drh. AISYAH	P	Auditor Ahli Muda	18
19	ROSARI LASTIYONO U, SE.	P	Auditor Ahli Muda	19
20	NURUL IMAMI, SE.	L	Auditor Ahli Muda	20
21	SUKMA HAYU P, S.Psi.	P	Auditor Ahli Pertama	21
22	DAVID CAHYONO, SH.	P	Auditor Ahli Pertama	22
23	JOHAN HADIPRADANA ELISA, SH.	L	Auditor Ahli Pertama	23
24	I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH.	L	Auditor Ahli Pertama	24
25	TIFFANY ANGGRAENI, S.Psi.	P	Auditor Ahli Pertama	25
26	NUR WIJAYANTI, SE.	P	Auditor Ahli Pertama	26
27	KARINA RAHMAWARDANI, SH.	P	Auditor Ahli Pertama	27
28	INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE.	P	Auditor Ahli Pertama	28
29	MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak.	P	Auditor Ahli Pertama	29
30	YUNI LISTIANINGRUM, SH.	P	P2UPD Ahli Pertama	30
31	MUHAMMAD RIZQY R, SH.	L	P2UPD Ahli Pertama	31

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
32	RIZKY AFRINA WULANSARI, SM.	P	Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	32 
33	FANI RACHMADIYANTO, S.Tr.I.P	L	CPNS	33 
34	ALIF HILYATUN NISAK, A.Md.	P	Pengelola Bahan Perencanaan	34 
35	ARI PURNOMO AJI, A.Md.Ak.	L	Auditor Terampil	35 
36	HAIDAR ADI MAHENDRA, A.Md.Ak.	L	Auditor Terampil	36 
37	IRSYA PRATIWI, A.Md.Ak.	P	Auditor Terampil	37 
38	ISABEL MARETA VINKA D, A.Md.Ak.	P	Auditor Terampil	38 
39	SALSABILA RAMADHANI P, A.Md.Ak.	P	Auditor Terampil	39 
40	SHANIA TRIASTIKA P, A.Md.Ak.	P	Verifikator Keuangan	40 
41	MUJIHARTO	L	Penyusun Laporan Keuangan	41 
42	TITIK WAHYUNI	P	Pengadministrasi Keuangan	42 
43	TOTO SURYADI	L	Pengadministrasi Keuangan	43 
44	ISTIANAH	P	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	44 
45	SUHARSONO	L	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	45 
46	MEDA YURITA PRASANTI, S.Pd.	P	Tenaga Administrasi	46 
47	KRISNU TANTRAYANA, SST.	L	Tenaga Administrasi	47 
48	MOH. HAMIM, ST.	L	Tenaga Administrasi	48 
49	TRIA PANGESTI, SH.	P	Tenaga Administrasi	49 
50	ADITYA WAHYU PRADANA, S.AB	L	Tenaga Administrasi	50 
51	LINDA MABRUROH, S.Pd	P	Tenaga Administrasi	51 
52	AONG FIRMANSHAH, ST	L	Tenaga Administrasi	52 
53	MUJIANTO	L	Tenaga Administrasi	53 
54	KASTO	L	Tenaga Kebersihan	54 
55				55

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


DIAN AGUSTIN, S.STP.

NIP. 19840806 200212 2 001

RENCANA KEGIATAN PENGAWASAN BULAN APRIL 2025

FOKUS PENGAWASAN	JENIS PENGAWASAN	AUDITI	PELAKSANA	WAKTU	KETERANGAN
SAKIP	Monev	seluruh OPD	Irbani I, II, III, IV	akhir April	
TS Internal		Internal Irbani	Irbani II, III, IV, Sus	Minggu ke-3 April	Irbani II -> Irbani III
					Irbani III -> Irbani IV
					Irbani IV -> Irbansus
					Irbansus -> Irbani I
TS Eksternal		Inspektorat Gresik	Irbani I	Minggu ke-4 April	Telaah sejawat oleh Inspektorat Kab. Ngawi
HPS	Reviu	Dinas Pendidikan	Irbani I	menunggu hasil koordinasi dengan BLP	Pengadaan seragam SD dan SMP
		Dinas PUTR	Irbani I		Jalan Duduksampeyan - Metatu
		Dinas Kesehatan	Irbani II		aldok dinkes, RSGS (pagar dan pos satpam)
		Dinas PUTR	Irbani III		2 paket pekerjaan (morowudi - benjeng, metatu - balongpanggang)
					*) paket pekerjaan leran - suci, tanggul morowudi/kambingan
					menunggu kepastian SK proyek strategis
		Dinas CKPKP	Irbani IV	Islamic Center, SPAM	
Probit Audit	audit	Dinas PUTR	Irbani I	menunggu permintaan OPD	Jalan Duduksampeyan - Metatu
		Dinas Kesehatan	Irbani II		pagar RSGS (tentatif menyesuaikan SK)
		Diskoperindag	Irbani III		pasar diskoperindag
		Dinas CKPKP	Irbani IV		Islamic Center, SPAM
PDTT BLT Desa Morowudi	PDTT	Desa Morowudi	Irbansus Auditor	April	
Dumas Pungli Masuk ASN		Dinas Pendidikan	Irbansus PPUPD	April	
Pendampingan ZI Kec. Tambak dan Sangkapura		Kec. Tambak, Kec. Sangkapura	Irbansus PPUPD	April	
SPM	Monev	Bag. Pemerintahan	Irbansus PPUPD	April	





DAFTAR MEDIA SOSIAL INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

No.	Media Sosial	Nama Media Sosial	Link Media Sosial
1	Instagram	Inspektorat Kabupaten Gresik	https://www.instagram.com/inspektorat_gresik/
2	Tiktok	Inspektorat Kabupaten Gresik	https://www.tiktok.com/@inspektorat_gresik
3	Facebook		
4	Threads		
5	Twitter		
6	Youtube	Insektorat Gresik	https://www.youtube.com/@Inspektora_tGresik
7	...	...	...

Instagram

Log In Sign Up



inspektorgresik
Inspektorat Kabupaten Gresik

266 posts 951 followers 68 following

Government organization

Pembinaan & Pengawasan Integritas

Edukasi tata kelola pemerintahan

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik



Galeri APIP



Instagram

Log In Sign Up



Search

For You

Explore

Following

LIVE

Upload

Profile

More

Company

Program

Terms & Policies

© 2026 TikTok

inspektora_gresik

Inspektora Kabupaten Gresik

Follow

Message

11 Following

191 Followers

557 Likes

Pembinaan & Pengawasan Integritas

Edukasi tata kelola pemerintahan

Videos

Reposts

Liked

Jenis Harta Apa yang Wajib Dilaporkan di LHKPN dan LHKASN?

▶ 368

Alasan Laporan Harta Kekayaan Wajib untuk Dilakukan

▶ 694

Isra Mi'raj

▶ 311

Ayo Laporan Segera LHKPN & LHKASN

▶ 595

Evaluasi & Apresiasi 2025 Untuk Starting Tahun 2026

▶ 250

Penyusunan & Finalisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2026

▶ 974

Membanggakan! Kab. Gresik Peringkat ke-2 di Indonesia

▶ 644

Selamat Hari Natal

▶ 118

Diklat Peningkatan Kompetensi Risk Assessment APIP Gresik Tahun 2025

▶ 109

Inspektora Kabupaten Gresik menerima studi kunjungan ke Inspektora Kota Jember

▶ 2725

HAKARDIA

▶ 709

Siapa yang Boleh Membuat Laporan Melalui WBS?

▶ 111

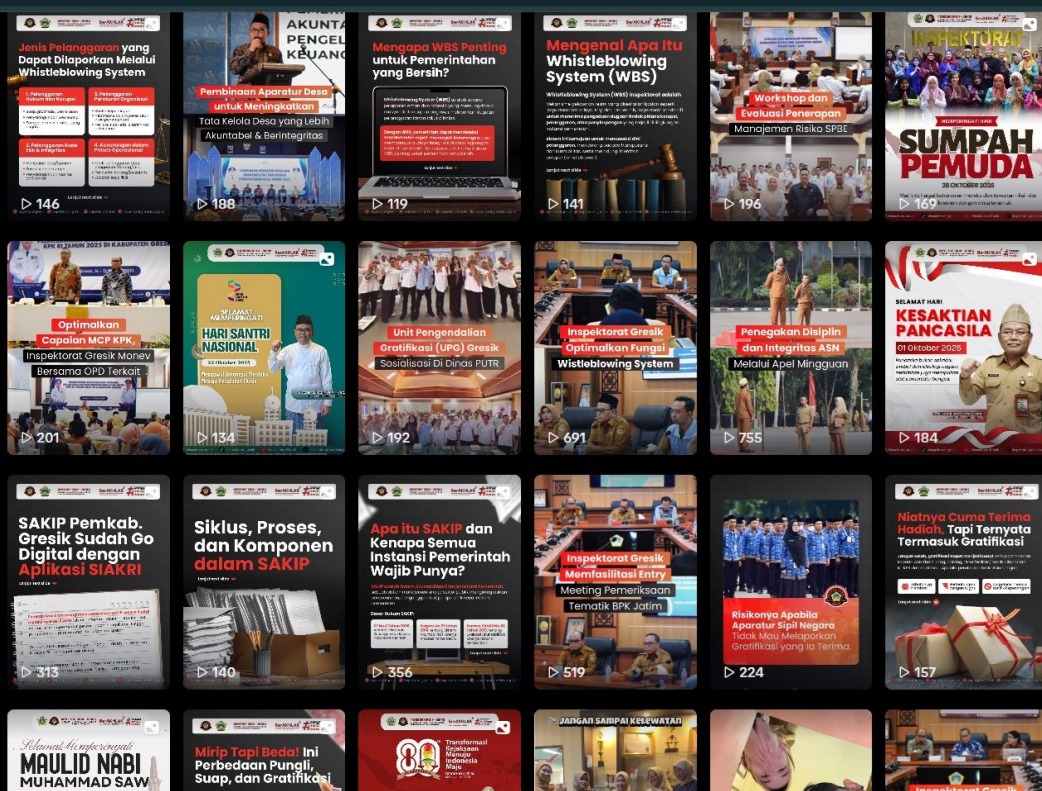
Jenis Delapanannya WBS

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Menanam WBS Sentra

Mengenal Apa Itu

INSPEKTORA



Search

For You

Explore

Following

LIVE

Upload

Profile

More

Log in

Company

Program

Terms & Policies

© 2026 TikTok

145

24

286

67

11.8K

1274

368

179

307

241

273

275

164

196

199

333

222

196

196

196

196

196

196

https://www.tiktok.com/@inspektorat_gresik/video/7536491287520857349

Search

For You

Explore

Following

LIVE

Upload

Profile

More

Log in

Company

Program

Terms & Policies

© 2026 TikTok

Home

Shorts

Subscriptions

You

History

Playlists

Watch later

Liked videos

Downloads

Explore

Music

Movies

Gaming

Show more

More from YouTube

YouTube Premium

YouTube Music

YouTube Kids

Settings

Search

Q

🎤

INSPEKTORAT
AUDIT
GRESIK

Inspektorat Gresik

@InspektoratGresik · 72 subscribers · 9 videos

More about this channel ...more

Subscribe

Videos

Shorts

Q

Galeri APIP

Strategi Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Di Instansi Pemerintah

5:39

INOVASI GALERI APIP (Strategi Akselerasi Pembangunan Zona Integritas di Instansi...

26 views · 4 months ago

3:53

pariwisata dan ekonomi kreatif

PROFIL SABER PUNGLI KABUPATEN GRESIK

27 views · 5 months ago

SOSIALISASI PENCEGAHAN KORUPSI DAN GRATIFIKASI PADA PROSES SPMB 2025...

95 views · 5 months ago

PEMBINAAN INTEGRITAS CPNS KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 OLEH...

135 views · 5 months ago

PERKENALAN INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

BERIKUT PROFIL SINGKAT INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

9:24

PROFIL INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

185 views · 6 months ago

https://www.youtube.com/watch?v=7hSvniXUjpw&pp=0gcICkKAlcqIYzv